No.2 Vol.9/Juli 2019

solid & solutif

SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

Meraih Opini WTP

Sebelas kali Berturut -turut

Prospek Industri Alas Kaki

Yang Semakin Cerah

MAJALAH SOLUSI

Wujudkan Kenyamanan Lingkungan Melalui Industri Hijau

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Opini WTP

Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan yang diperiksanya, tentu merupakan hal yang didambakan oleh setiap institusi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dengan memperoleh opini WTP tersebut berarti laporan keuangan dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Dalam hal ini, berdasarkan bukti-bukti audit yang dijumpai oleh pemeriksa, entitas dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Seandainyapun ada kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Baru-baru ini BPK kembali memberikan opini WTP terhadap laporan keuangan Kementerian Perindustrian tahun 2018. Hal ini sangat membanggakan bagi seluruh jajaran pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian, karena opini WTP tersebut adalah yang kesebelas kalinya berturut-turut sejak laporan keuangan tahun 2008. Boleh dikata, ini merupakan prestasi yang luar biasa, khususnya dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan negara.

Tema tentang perolehan opini WTP tersebut menjadi fokus bahasan utama Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini. Melalui laporan utama tentang opini WTP yang kesebelas kalinya ini, kami mencoba mengetengahkan informasi di sekitar upaya jajaran Kementerian Perindustrian dalam menjalankan tata kelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Selain laporan utama yang berkaitan dengan pengawasan, kami menyajikan laporan khusus tentang industri. Kali ini kami menyajikan liputan tentang prospek industri alas kaki yang tampak semakin cerah ke depannya. Di tahun 2018 lalu, jumlah produksi sektor industri alas kaki mencapai 1,41 miliar pasang sepatu sehingga mengantarkan Indonesia menduduki posisi keempat produsen alas kaki di dunia setelah China, India dan Vietnam. Demikian pula dengan capaian ekspor kelompok industri alas kaki nasional di tahun 2018 meningkat hingga 4,13 persen atau naik menjadi US$ 5,11 miliar dari tahun sebelumnya (2017) sebesar US$ 4,91 miliar. Ke depan, peningkatan tersebut diharapkan akan lebih baik lagi. Apalagi industri alas kaki merupakan salah satu sektor industri prioritas untuk dikembangkan.

Sebagai majalah yang berorientasi pada informasi tentang pengawasan dan industri, Majalah Pengawasan SOLUSI juga mengetengahkan rubrik Sosok Inspiratif, yang isinya menampilkan tentang tentang sosok-sosok yang dapat memberikan inspirasi dan keteladanan bagi para aparatur sipil negara (ASN) dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penerbitan kali ini kami mengetengahkan tentang perjalanan hidup seorang tokoh di bidang pengawasan. Beliau adalah Gandhi, yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 1983 – 1993. Kiprahnya dalam pengawasan terhadap keuangan negara sudah diakui dan tak ada keraguan lagi, dan oleh karenanya beliau dijuluki sebagai Sang Pengawas.

Akhirnya untuk Anda semua kami sampaikan selamat membaca.

ISSN : 2088 - 0073

SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung
Komjen (Pol) Drs. Setyo Wasisto, SH
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum
Ir. Liliek Widodo, M.Si
Sekretaris Itjen

Dewan Pembina
Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi
Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi
Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Heri Purnomo, ST

Editor
Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Desain Grafis
Adhika Pradhana Sulaksana Wibowo, SE

Fotografer
Noa Salfhali, ST

Tenaga Sekretariat
Gusnaldi, SMI
Augus Napitupulu

Alamat Redaksi
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id

Majalah Pengawasan SOLUSI
Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat
E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id

DOWNLOAD

Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari
www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Inspektur Bicara

6

Pengawasan Partisipatif melalui Penerapan Manajemen Risiko

Aktual

9

Tradisi Tahunan Kementerian Perindustrian: Meraih Opini WTP

Kabar Industri

26

Industri Alas Kaki: Ketika Prospeknya Semakin Cerah

Lebih Dekat dengan Auditi

38

SMK - SMTI Pontianak: Lulusan yang Kompeten dan Siap Kerja

Sosok Inspiratif

43

Gandhi: Sang Pengawas yang Melegenda

Telaah

48

Mencegah Suap melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Pengawasan Partisipatif melalui Penerapan Manajemen Risiko

Oleh : Wawas Swathatafrijiah
Inspektur IV Inspektorat Jenderal Kemenperin

Diawali dengan sebuah ungkapan, "Akan sangat peduli jika merasa memiliki". Maknanya, milik kita pasti akan dijaga dan dipelihara dengan baik. Begitu pula dengan kegiatan pekerjaan; jika kegiatan itu milik kita maka akan dijaga dan dilaksanakan dengan baik.

Keberhasilan suatu program dan kegiatan tidak terlepas dari proses dan kegiatan pengawasannnya. Pada dasarnya, terhadap pekerjaan yang kita lakukan akan terasa lebih nyaman jika kita sendiri yang melakukan pengawasannya (*self control*). Sementara jika ada pihak lain yang ikut mengawasi, kenyamanan itu terasa terganggu.

Ketika melaksanakan suatu kegiatan tentunya ada tujuan yang hendak dicapai. Oleh karena itu segala daya dan upaya akan dikerahkan untuk mencapai tujuan tersebut, walau kenyataannya sering kali mendapat hambatan, bahkan terjadi penyimpangan terhadap arah pencapaian tujuan. Oleh karena itu dalam pencapaian tujuan ada dua hal utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu: proses pencapaian tujuan, dan kontrol terhadap ketidaksesuaian pencapaian tujuan.

Pengendalian terhadap risiko yang potensial timbul akan memudahkan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Risiko berbeda dengan masalah. Masalah

adalah sesuatu yang sudah terjadi yang mengganggu terhadap keberhasilan/ tercapainya tujuan. Sedangkan risiko adalah sesuatu yang diprediksi akan menimbulkan masalah, atau kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak menguntungkan. Dalam penanganannya, masalah perlu diselesaikan (*problem solving*); sedangkan risiko perlu dikendalikan atau dicegah (*risk control*).

Pengawasan internal pada dasarnya lebih berperan sebagai benteng pertahanan pada level tiga. Sedangkan pengawasan level satu dan dua berada pada tingkat pemilik kegiatan, itulah yang kita namakan pengawasan partisipatif. Oleh karena itu perlu pemahaman dan pengimplementasian bersama pada semua level di organisasi untuk menerapkan manajemen risiko (*risk management*).

Manajemen risiko, sebagaimana dirangkum oleh Boehm (1991), terdiri dari elemen-elemen penilaian risiko (*risk assessment)*, dan pengendalian risiko (*risk management*). Penilaian risiko dilakukan melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan prioritas risiko. Sedangkan pengendalian risiko melalui perencanaan manajemen risiko, resolusi risiko, dan pemantauan risiko.

Manajemen risiko difokuskan pada identifikasi masalah di masa depan. Walaupun sulit untuk memprediksi peristiwa dan masalah di masa depan, namun studi tentang kegiatan-kegiatan sebelumnya dapat membantu menyadarkan pelaksana kegiatan dalam memahami hambatan-hambatan potensial untuk diraihnya kesuksesan pada kegiatan baru. Oleh karena itu pelaksanaan monitoring dan evalausi suatu kegiatan merupakan proses yang harus dilakukan.

Pada kesempatan ini akan disampaikan sekilas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan penilaian risiko. **Pertama**, tentang identifikasi risiko. Mengidentifikasi risiko perlu dilakukan dengan kecermatan dan ketajaman, karena ini merupakan suatu langkah yang sangat penting. Dalam melakukan identifkasi risiko, kemungkinan penyebab risiko sebagai faktor risiko. Namun faktor risiko bukan identitas dari suatu risiko. Misalnya, jika kegagalan suatu kegiatan sebagai suatu risiko yang mungkin terjadi, maka faktor risikonya bisa disebabkan oleh kurangnya kompetensi dari pelaksana kegiatan, atau karena ada faktor lain penyebab terjadinya risiko. Sehingga dengan demikian, dalam melakukan identifikasi risiko perlu dituangkan juga faktor risikonya.

Ada beberapa cara dalam melakukan identifikasi risiko, seperti melalui brainstorming, teknik Delphi, atau melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Identifikasi risiko dapat juga dilakukan melalui analisis akar penyebab, analisis SWOT, analisis daftar periksa, atau analisis asumsi.

Kedua, tentang analisis risiko. Setelah melakukan identifikasi risiko, kita perlu melakukan analisis risiko untuk menentukan tingkat risiko yang paling signifikan terhadap keberhasilan kegiatan. Analisis risiko terdiri dari dua komponen, yaitu: probabilitas (kemungkinan terjadi), dan dampak risiko. Sedangkan tujuan dari analisis risiko adalah untuk mengidentifikasi terhadap respon risiko yang membutuhkan perhatian segera, seperti paparan risiko pada kegiatan, dampak risiko terhadap tujuan kegiatan, menentukan biaya dan penjadwalan kembali jika terjadi risiko, dan sebagainya.

Beberapa teknik dalam menentukan probabilitas dan dampak risiko secara kuantitatif dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti: wawancara, perkiraan biaya dan waktu, teknik delphi, rekaman/catatan masa lalu, penilaian ahli, analisis nilai ekonomi yang diharapkan,

analisis Monte Carlo, dan diagram pohon keputusan. Dalam tulisan ini dijelaskan sekilas dari beberapa cara tersebut.

Nilai ekonomi yang diharapkan adalah ukuran yang baik untuk menentukan peringkat risiko secara keseluruhan. Rumusnya adalah NE = P x D; di mana "NE" adalah nilai ekonomi, "P" adalah probabilitas, dan "D" adalah dampak. Sedangkan analisis Monte Carlo dilakukan dengan mensimulasikan jadwal hasil kegiatan, dengan input utama untuk analisis ini adalah diagram jaringan dan perkiraan biaya untuk melakukan kegiatan.

Selanjutnya tentang pohon keputusan. Pohon keputusan membantu menganalisis banyak alternatif pada satu waktu, yang merupakan model dari situasi nyata. Pohon keputusan memperhitungkan peristiwa di masa depan dalam pengambilan keputusan hari ini. Teknik ini dilakukan untuk membantu menghitung nilai ekonomi yang diharapkan dalam situasi yang lebih kompleks.

Ketiga, tentang prioritasi risiko. Sebagaimana hasil dari identifikasi dan analisis resiko, daftar risiko dapat disusun berdasarkan urutan prioritas. Penanganan risiko atau pengendalian risiko, akan berfokus pada risiko-risiko yang sangat prioritas untuk ditangani karena sangat berdampak pada tercapainya tujuan kegiatan. Urutan prioritas risiko akan berkaitan dengan kebijakan dalam malakukan tindakan pengendalian, risiko yang bernilai tinggi bobotnya tentunya akan mendapat perhatian dalam pengendaliannya. Dengan berbagai keterbatasan (waktu, biaya dan sumber daya lainnya) tidak semua risiko perlu dikendalikan. Urutan prioritas menjadi pertimbangan risiko mana saja yang perlu dikendalikan.

Hal yang penting untuk menyusun daftar risiko dan pertimbangan-pertimbangan lain adalah: (a) berupa daftar risiko terukur yang diprioritaskan; (b) jumlah waktu dan besar biaya yang dibutuhkan; (c) kemungkinan tanggal penyelesaian realistis dan dapat dicapai dengan tingkat keyakinan atas waktu dan biaya untuk kegiatan; (d) probabilitas kuantitatif untuk memenuhi tujuan kegiatan, biasanya keluar bentuk angka kuantitatif; dan (e) kecenderungan dalam analisis risiko kuantitatif, jika pada hasil pembobotan risiko mempunyai nilai yang sama.

Sebagai penutup tulisan ini, konsekuensi pelaksanaan manajemen risiko perlu disertai pengurangan volume audit. Dalam hal ini, audit ditekankan pada kondisi kegiatan yang mempunyai risiko lebih tinggi (*risk base audit*).

> **"Cinta adalah kekuatan aktif yang bersemayam dalam diri manusia; kekuatan yang mengatasi tembok yang memisahkan manusia dengan sesamanya, kekuatan yang menyatukan manusia dengan yang lainnya. (Erich Fromm)**

Tradisi Tahunan Kementerian Perindustrian: Meraih Opini WTP

Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga agaknya telah menjadi tradisi tahunan bagi Kementerian Perindustrian. Tahun ini, opini WTP kembali diraih untuk yang kesebelas kalinya berturut-turut. Prestasi yang layak dicatat dan mendapat tempat tersendiri.

Hari itu, Rabu, 12 Juni 2019 bertempat di Gedung BPK, Jakarta ada acara terbilang istimewa: Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) 2018. Tampak hadir dalam acara tersebut mewakili Kementerian Perindustrian, yaitu Sekretaris Jenderal Haris Munandar, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, dan Kepala Biro Keuangan Fauzi Saberan. Dengan wajah sumringah, Haris Munandar melangkah menuju panggung untuk menerima LHP atas Laporan Keuangan Kemenperin tahun 2018 yang memperoleh opini WTP. Penyerahan LHP diserahkan langsung oleh Anggota II BPK Agus Joko Pramono kepada Sekretaris Jenderal Kemenperin.

Kegembiraan yang terpancar dari raut wajah Haris Munandar boleh dikata mewakili seluruh pegawai di lingkungan Kemenperin. Betapa tidak, opini WTP yang diberikan oleh BPK tersebut adalah yang kesebelas kalinya, dan berturut-turut pula. "Ini merupakaan penghargaan bagi kami, yang sekaligus wujud konsistensi dalam mempertahankan kinerja pengelolaan keuangan yang baik atau prudent," kata Sekretaris Jenderal

Kemenperin seusai menghadiri acara. Menurut Haris, keberhasilan dalam mempertahankan opini WTP ini tidak lepas dari komitmen dan kekompakan dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenperin.

Haris menegaskan, seluruh pegawai Kemenperin dari tingkat pimpinan tertinggi sampai jajaran staf terus bertekad melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam tahun-tahun mendatang. Selain itu, menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi BPK sehingga opini WTP dapat dipertahankan.

Hal senada juga disampaikan oleh Inspektur Jenderal Kemenperin Setyo Wasisto, yang menyampaikan rasa bangga dan bersyukur atas upaya yang telah dilakukan seluruh jajaran Kemenperin dalam mempertahankan tradisi meraih opini WTP dari BPK. Ia menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada seluruh insan Kemenperin atas kerja sama dalam mengelola keuangan dengan baik. "Alhamdulilah, ini merupakan kerja keras dari semua sektor Kemenperin," tuturnya.

Menyimak gambaran umum laporan keuangan Kemenperin tahun 2018, pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), disajikan nilai realisasi pendapatan sebesar Rp 256,79 miliar atau mencapai 106,77 persen dari target pendapatan sebesar Rp 240,52 miliar. Sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp 2,62 triliun atau mencapai 92,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 2,8 triliun.

Sementara itu pada Laporan Neraca, disajikan nilai Aset Lancar sebesar Rp 418,48 miliar, Aset Tetap (netto) Rp 4,89 triliun, aset lain Rp 356,92 miliar, kewajiban Rp 24,94 miliar, dan ekuitas sebesar Rp 5,64 triliun.

Sekilas Kisah tentang Keberhasilan

Opini BPK merupakan pengakuan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Hal

ini memperhatikan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan informasi laporan keuangan sesuai SAP, kepatuhan pada Peraturan dan Perundang-undangan, serta efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Cerita tentang keberhasilan Kemenperin dapat meraih opini WTP atas laporan keuangannya tidak terlepas dari peran Menteri Perindustrian yang ketika itu dijabat oleh Fahmi Idris. Beberapa bulan setelah diangkat sebagai Menteri Perindustrian, di sekitar tahun 2006 dalam suatu rapat pimpinan dengan para pejabat eselon I, Fahmi Idris mengutarakan keprihatinannya atas opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kemenperin yang *Disclaimer*. Sebagai seorang dengan latar belakang pendidikan sarjana ekonomi, Fahmi Idris sadar betul apa makna opini *Disclaimer* bagi suatu institusi pemerintah, terutama dalam hal pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Di hadapan para pejabat esolon I dalam rapat tersebut, Fahmi Idris dengan spontan mengutarakan . "Saya mengerti betul apa makna *disclaimer*! Malu besar saya!", ujar Fami Idris mengutarakan keprihatinannya.

Segera setelah itu, para pimpinan eselon I dengan dimotori oleh Sekretariat Jenderal (dalam hal ini Biro Keuangan) dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dengan cepat melakukan konsolidasi dan membuat peta jalan (road map) untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas sehingga mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kepala Biro Keuangan Kemenperin Fauzi Saberan dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI menyempatkan diri untuk bercerita tentang perjalanan Kemenperin untuk meraih opini WTP. Menurut Fauzi, boleh dikata tahun 2006 merupakan masa konsolidasi. Di tahun itu laporan keuangan Kemenperin masih memperoleh opini *disclaimer*. Selanjutnya, upaya dan kerja keras dari seluruh pimpinan unit-unit kerja di lingkungan Kemenperin akhirnya membuahkan hasil: Laporan Keuangan Kemenperin tahun 2007 naik kelas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Setahun kemudian, Laporan Keuangan Kemenperin tahun 2008 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini adalah opini tertinggi dari empat jenis opini terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh BPK. Satu hal yang patut dicatat adalah, ketika itu Kemenperin merupakan satu-satunya instansi pemerintah dengan entitas besar yang memperoleh opini WTP. Lebih hebatnya lagi, opini WTP tersebut terus diraih setiap tahunnya selama sebelas kali secara terturut-turut hingga tahun ini.

Selanjutnya Fauzi Saberan menuturkan: "Seluruh insan Kemenperin, mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan seluruh staf, akan terus berkomitmen melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan keuangan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan berupa temuan dan rekomendasi BPK sehingga opini WTP dapat dipertahankan".

Beberapa Permasalahan/Temuan

Untuk diketahui, dengan perolehan opini WTP tersebut maka laporan keuangan dianggap telah memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, yang berarti auditor meyakini

berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, entitas dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Seandainyapun ada kesalahan, kesalahan tersebut dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

Dengan demikian, walaupun telah memperoleh opini WTP bukan berarti tidak ada temuan atau permasalahan yang dijumpai. Demikian pula dengan hasil audit terhadap laporan keuangan Kemenperin, terdapat beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disampaikan.

Beberapa permasalahan atau temuan terhadap laporan keuangan Kemenperin tahun 2018, secara umum terdapat dua hal yang menjadi catatan. Pertama, mencakup beberapa masalah yang berkaitan dengan kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern; masih terdapat proses hibah atas aset ke pemerintah daerah atau kelompok masyarakat yang belum terselesaikan; dan penatausahaan aset tetap yang dianggap kurang memadai. Selanjutnya permasalahan yang kedua adalah dalam hal kepatuhan terhadap peraturan perundangan. Dalam hal ini BPK mencatat bahwa pada beberapa satker masih terdapat ketidakcermatan yang menyebabkan kelebihan pembayaran; pertanggungjawaban yang kurang sesuai ketentuan; dan keterlambatan pembayaran denda oleh pihak ketiga yang terlambat.

Atas permasalahan atau temuan yang disampaikan oleh BPK tersebut, pihak Kemenperin yang dalam hal ini diwakili oleh Biro Keuangan terus mendorong para satker terkait untuk melakukan penyelesaian hibah; membenahi sistem penatausahaan asset; melakukan pembinaan secara berkelanjutan, dan melakukan verifikasi lanjutan terhadap temuan-temuan yang ada sesuai rekomendasi BPK. Selain itu, BPK juga merekomendasikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencegah temuan-temuan tersebut kembali terulang.

Di sisi lain, dalam hal tindak lanjut penyelesaian dari temuan dan rekomendasi BPK, Inspektorat Jenderal Kemenperin juga selalu mendorong serta membantu penyelesaian tindak lanjutnya; serta terus melakukan pemantauan atas penyelesaian tindak lanjut tersebut kepada satker-satker terkait.

Bulat Tekad Pertahankan WTP

Tekad untuk terus mempertahankan opini WTP terhadap laporan keuangan Kemenperin terus ditanamkan kepada para pejabat atau staf yang terkait. Kepala Biro Keuangan Kemenperin Fauzi Saberan menuturkan, "Ke depan, secara terus menerus akan dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pertanggungjawaban anggaran sampai dengan pelaporan keuangan dengan meningkatkan kemampuan SDM serta penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi."

Dalam upaya terus mempertahankan opini WTP tersebut, beberapa upaya yang terus dilakukan antara lain, menjaga tata kelola keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan SAP. Upaya ini dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis terkait tata kelola dan pelaporan keuangan dan barang milik negara (BMN) secara berkala dan berkelanjutan; serta peningkatan *awareness* atas pentingnya tata kelola dan pelaporan keuangan. Di samping itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan terus ditingkatkan kualitasnya.

Demikian pula ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara diupayakan agar selalu dijaga. Hal ini dilakukan melalui peningkatan peran dan komitmen terhadap kepatuhan, internalisasi nilai-nilai etika dan integritas, serta memperkuat peran APIP dalam setiap proses keuangan.

Terkait dengan efektivitas pengendalian intern, langkah-langkah yang dilakukan adalah melalui peningkatan keterlibatan dan komitmen seluruh lapisan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan. Demikian pula dengan penguatan terhadap fungsi SPIP yang selalu dimonitor dan dievaluasi.

Tekad dan semangat untuk menjaga dan mempertahankan opini WTP terhadapat laporan keuangan Kemenperin sudah seharusnya selalu dipelihara, agar keuangan negara tetap terjaga dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara.
(Edwardyah Nurdin).

"Tuntutan *Shareholder* akan Terus Berkembang"

Pertengahan Juni lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun anggaran 2018. Hal yang membanggakan, opini WTP tersebut adalah untuk yang kesebelas kalinya berturut-turut. Atas penghargaan yang kembali diperoleh itu, Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada awal Juli lalu menyempatkan diri untuk mewawancarai Kepala Biro Keuangan Kemenperin Fauzi Saberan. Menanggapi diraihnya kembali opini WTP tersebut, Fauzi Saberan menyatakan, "Capaian ini merupakan hal yang membanggakan, tetapi kita juga harus menyadari bahwa tuntutan shareholder yang semakin meningkat dan kompleksitas keuangan akan terus berkembang". Berikut petikannya:

Kemenperin kembali berhasil memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya. Bagaimana tanggapan Bapak?

Opini BPK merupakan pengakuan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan dengan memperhatikan kepada empat aspek, yaitu: kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); kecukupan pengungkapan informasi keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur

SAP; kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Keberhasilan Kemenperin meraih opini WTP bukan hanya merupakan keberhasilan satu unit tertentu, akan tetapi merupakan keberhasilan kita sebagai satu entitas besar yang terdiri dari banyak satuan kerja. Karena itu, capaian ini merupakan hal yang membanggakan, tetapi kita juga harus menyadari bahwa tuntutan *shareholder* yang semakin meningkat dan kompleksitas keuangan akan terus berkembang sehingga kita harus terus maju dan berkembang untuk terus mempertahankan capaian ini.

Langkah-langkah atau kebijakan apa yang dilakukan oleh Kemenperin sehingga bisa memperoleh dan mempertahankan opini WTP sampai 11 kali berturut-turut?

Dalam upaya meraih dan mempertahankan WTP, Kemenperin selalu berusaha memenuhi empat aspek yang terkandung dalam SAP, menyajikan informasi secara cukup, menaati peraturan perundangan, dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern. Selain itu, kita juga terus melakukan peningkatan kualitas SDM terutama di bidang keuangan sehingga Kemenperin mampu memperoleh opini WTP sampai sebelas kali berturut-turut.

(Fauzi Sabran kemudian bercerita panjang lebar tentang sejarah pembenahan Laporan Keuangan di lingkungan Kemenperin dimulai dari tahun 2006 ketika opini laporan keuangan masih disclaimer sampai berhasil memperoleh WTP sebelas kali berturut. Lihat uraian di rubrik Aktual. (Red).

Secara umum, bagaimana gambaran dari satker-satker di lingkungan Kemenperin dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran?

Satker-satker di lingkungan Kemenperin telah melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran sesuai dengan kaidah dan aturan yang ada serta didukung dengan sistem/ teknologi informasi yang baik.

Meskipun begitu, masih terdapat hal-hal yang memiliki ruang perbaikan dan pengembangan untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi karena aturan maupun sistem pelaksanaan anggaran dan keuangan selalu berubah dan berkembang sesuai kebutuhan.

Dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kemenperin, permasalahan-permasalahan apa saja yang masih terjadi dalam pengelolaan keuangan?

Secara kesesuaian terhadap SAP dan penyajian pengungkapan informasi, laporan keuangan Kemenperin telah dilakukan dengan sangat baik. Namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh BPK, terdapat dua hal yang menjadi catatan. Pertama, (beberapa masalah yang berkaitan dengan) kelemahan pada Sistem Pengendalian Intern; masih terdapat proses hibah atas aset ke pemerintah daerah atau kelompok masyarakat yang belum terselesaikan; dan penatausahaan aset tetap yang dianggap kurang memadai. Selanjutnya yang kedua adalah, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, di mana pada beberapa satker masih terdapat ketidakcermatan yang menyebabkan kelebihan pembayaran, pertanggungjawaban

yang kurang sesuai ketentuan, dan keterlambatan pembayaran denda oleh pihak ketiga yang terlambat.

Apa rekomendasi BPK untuk mengatasi permasalahan tersebut dan bagaimana langkah-langkah tindak lanjutnya?

Kami terus mendorong para satker terkait untuk melakukan penyelesaian hibah, membenahi sistem penatausahaan aset, melakukan pembinaan secara berkesinambungan, dan melakukan verifikasi lanjutan terhadap temuan-temuan yang ada sesuai rekomendasi BPK. Selain itu, BPK juga merekomendasikan untuk melakukan perbaikan-perbaikan untuk mencegah temuan-temuan tersebut kembali terulang.

Dalam hal tindak lanjut penyelesaian, Inspektorat Jenderal selalu mendorong serta membantu penyelesaian temuan serta terus melakukan pemantauan atas penyelesaian kepada satker-satker terkait.

Perolehan opini WTP tidak menjamin bahwa tidak ada praktik penyelewengan keuangan dari suatu institusi. Apa yang dilakukan oleh Kemenperin dalam mencegah terjadinya penyelewengan tersebut?

Tentunya yang utama dalam mencegah praktik penyelewengan keuangan adalah dengan terus melakukan perbaikan mental SDM aparatur Kemenperin, yang juga merupakan tujuan utama reformasi birokrasi di lingkungan Kemenperin.

Seiring pelaksanaan reformasi birokrasi, kita telah melakukan upaya-upaya peningkatan integritas secara masif di seluruh satker Kemenperin. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya pembangunan zona integritas pada seluruh satker di Kemenperin sampai dengan tahun 2019

Melalui pembangunan zona integritas tersebut, saat ini terdapat 12 satker Kemenperin yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Demikian pula dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik yang kita lakukan sudah menggunakan sistem teknologi informasi yang terbuka, transparan dan akuntabel.

Harapan atau pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para ASN di lingkungan Kemenperin, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara?

Pengelolaan keuangan negara tentunya harus berbasis kinerja sehingga menghasilkan output dan outcome yang maksimal.

Ke depan, secara terus menerus akan dilakukan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan; mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, pertanggungjawaban anggaran sampai dengan pelaporan keuangan dengan meningkatkan kemampuan SDM serta penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi.

Diharapkan seluruh ASN, bukan hanya yang mengelola keuangan, dapat bekerja secara tulus, ikhlas, menjaga integritas, serta selalu bersinergi untuk menjaga institusi kita dari hal-hal negatif. Serta tidak lupa untuk selalu berdoa agar mendapat lindungan dan berkah dari Yang Maha Kuasa.

(Singgih Budiono).

Meneropong Efektivitas Program Diklat Sistem 3 in 1

Oleh : Afrizal Haris
Auditor Muda pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Setelah resmi dinyatakan terpilih sebagai Presiden periode 2019 – 2024, pada 14 Juli 2019 lalu Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang diantaranya tentang visi Indonesia ke depan, dengan tahapan-tahapan besar yang akan dilakukan menuju sebuah negara yang lebih produktif, memiliki daya saing, dan yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan. Salah satu tahapan besar yang menjadi fokus adalah meningkatkan investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan dan pembangunan sumber daya manusia. Peningkatan investasi merupakan kunci bagi terbukanya lapangan pekerjaan selebar-lebarnya. Di lain sisi, pembangunan sumber daya manusia menjadi hal utama yang perlu segera digarap dengan mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten. Sumber daya manusia yang produktif dapat meningkatkan daya saing industri nasional sehingga ekonomi bangsa dapat bergerak dan bertumbuh.

Pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan merupakan salah satu pilar penting yang perlu dibenahi dan dikembangkan. Dalam hal ini, Kementerian Perindustrian berkomitmen dalam usaha peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia industri sejak dimulainya kebijakan reposisi pengembangan unit-unit pendidikan dan Balai Diklat Industri (BDI) di Lingkungan Kementerian Perindustrian yang ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 09/SJ-IND/PER/10/2012. Salah satu tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut adalah terwujudnya Pusdiklat Industri sebagai *holding* dalam menyiapkan SDM Industri yang kompeten dan terwujudnya BDI yang berbasis pada spesialisasi dan kompetensi dalam menciptakan SDM industri yang siap pakai dan wirausaha industri kecil dan menengah melalui program Diklat Sistem 3 in 1 (Three in One).

Analisis Risiko Program Diklat Sistem 3 in 1

Diklat Sistem 3 in 1 meliputi pelaksanakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi bagi calon tenaga kerja industri, sertifikasi kompetensi, serta penempatan kerja di perusahaan. Sasarannya, peserta didik yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Program dan kegiatan ini dilaksanakan oleh Pusdiklat dan tujuh Balai Diklat Industri di lingkungan Kementerian Perindustrian. Target jumlah tenaga kerja industri sebagai output Diklat Sistem 3 in 1 baik di Pusdiklat maupun tujuh BDI sebanyak 32.000 orang pada 2018, 72.000

orang pada 2019 dan 100.000 orang pada 2020. Jumlah yang meningkat signifikan dari tahun ke tahun.

Pertanyaannya adalah, bagaimana efektivitas program Diklat Sistem 3 in 1 yang selama ini telah dilakukan? Pengawasan terhadap program ini telah sering dan rutin dilakukan baik oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Beberapa kondisi yang dapat menggambarkan apa saja risiko yang dihadapi dalam pencapaian efektivitas program ini, menurut pengamatan penulis, setidaknya ada lima poin.

Pertama; efektivitas pengelolaan kinerja program Diklat Sistem 3 in 1 ini dipengaruhi, salah satunya, oleh ketepatan dalam menentukan sasaran strategis, indikator kinerja serta targetnya baik pada rencana strategis (renstra) lima tahunan maupun dalam rencana kinerja (renkin) tahunan yang selaras dan memenuhi kriteria *SMART (specific, measureable, achieveable, relevanandtime horizon)*. Selaras dalam hal ini dapat berarti penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja seharusnya sama untuk seluruh pelaksana program tersebut, baik pada lingkup Pusdiklat maupun BDI. Ketidakselarasan sasaran strategis dan indikator kinerja akan menyebabkan kinerja program ini akan sulit dievaluasi. Disamping itu, penetapan target yang tidak masuk akal dan/atau tidak sesuai dengan kapasitas kemampuan internal, juga akan menyebabkan risiko kinerja tidak akan tercapai; dan terlebih lagi akan sangat berisiko terjadinya penyimpangan pengelolaan anggaran.

Kedua; target kinerja yang ditetapkan terlalu tinggi dan melebihi batas kemampuan akan menyebabkan risiko pelaksanaan kegiatan hanya fokus pada banyaknya jumlah peserta yang di-diklat-kan dan ditempatkan kerja, tetapi tidak fokus pada kualitas dan kompetensi peserta. Padahal, seharusnya angka capaian target Diklat 3 in 1 dalam satu paket adalah berupa jumlah peserta diklat yang telah lulus uji kompetensi serta yang ditempatkan bekerja.

Ketiga; setiap komoditi industri memiliki karakteristik dan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang beragam, seperti contohnya kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang bergerak di bidang tekstil tentunya akan berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang agro dan logam. Industri tekstil saat ini masih identik dengan industri yang padat karya sehingga membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan industri lainnya. Hal ini tentunya menjadi risiko dan tantangan tersendiri dalam menentukan target untuk masing-masing unit pelaksana program Diklat Sistem 3 in 1, khususnya untuk tujuh unit BDI.

Terkait dengan hal tersebut maka prinsip proporsionalitas perlu dipertimbangkan dalam menentukan target untuk masing-masing unit kerja BDI; serta harus mengacu pada hasil analisis kebutuhan tenaga kerja untuk masing-masing komoditi industri dan kapasitas kemampuan masing-masing unit pelaksana program Diklat Sistem 3 in 1. Jangan sampai nantinya ketika salah dalam menetapkan target kinerja, pelaksanaan kerjasama Diklat Sistem 3 in 1 dengan perusahan tidak sesuai dengan kompetensi unit kerja BDI yang bersangkutan karena kurangnya peserta yang akan diikutkan diklat dari target yang ditetapkan.

Keempat, banyaknya target peserta diklat yang harus dicapai menimbulkan risiko pula pada tahapan perekrutan peserta. Dalam hal ini persyaratan peserta Diklat Sistem 3 in 1 telah

ditetapkan dan diatur dalam SKKNI. Namun jika mekanisme perekrutan dan/atau verifikasi peserta yang akan diikutkan diklat tidak dijalankan secara memadai, akan banyak peserta yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ditetapkan dalam SKKNI.

Kelima; banyaknya target kinerja yang harus dicapai akan berisiko pada proses administrasi pelaporan kegiatan dan dapat menyebabkan pengelolaan keuangan menjadi tidak akuntabel.

Langkah Antisipatif

Dengan melihat beberapa hal yang dapat menimbulkan risiko ketidaktercapaian target kinerja program Diklat Sistem 3 in 1 di atas, maka sudah selayaknya perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif untuk mencegah atau meminimalkan risiko. Untuk itu, penulis mencoba memberikan sumbang-saran berikut ini.

Pertama, ada baiknya dilakukan penyelarasan sasaran strategis dan indikator kinerja secara terpusat; serta menetapkan target kinerja yang realistis dengan mengacu pada hasil analisa kebutuhan tenaga kerja untuk masing-masing komoditi industri dan kapasitas kemampuan masing-masing unit kerja yang melaksanakan program diklat tersebut.

Kedua, melakukan evaluasi secara mendalam dan memadai terhadap penyelenggaraan Diklat Sistem 3 in 1 yang sekurang-kurangnya meliputi: (a) kecukupan persyaratan dan metode uji calon peserta sesuai dengan SKKNI; (b) kesesuaian kompetensi instruktur dengan materi dan bidang kompetensi yang akan diajarkan dan diujikan; dan (c) kesesuaian materi yang diajarkan dengan yang akan diujikan.

Ketiga; membuat dan menetapkan rencana aksi yang berkaitan dengan: (a) pembangunan sistem aplikasi secara online dan terintegrasi terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Diklat Sistem 3 in 1, yang meliputi proses perekrutan peserta yang memungkinkan tercapainya efisiensi waktu serta meminimalisir risiko mendapatkan peserta yang tidak sesuai dengan persyaratan SKKNI; (b) Standar penyusunan Laporan Kegiatan Diklat Sistem 3 in 1 secara komprehensif, yang menyajikan seluruh informasi terkait proses kerjasama dengan perusahaan (MoU), proses perekrutan peserta, pelaksanaan diklat, sertifikasi dan penempatan bekerja.

Keempat; menetapkan kebijakan pelaksanaan kegiatan Diklat Sistem 3 in 1 yang tepat untuk meminimalisir risiko terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangannya.

Dengan demikian, harapan dan tantangan mewujudkan sumber daya manusia industri untuk meningkatkan daya saing industri nasional dalam rangka penumbuhan ekonomi bangsa dapat terwujud secara efektif. Sehingga output yang dihasilkan pada program Diklat Sistem 3 in 1 ini tetap berorientasi pada kuantitas, tanpa mengabaikan kualitas.

> **Hampir semua orang dapat menanggung kemalangan; tapi jika Anda ingin menguji watak manusia, coba beri dia kekuasaan. (Abraham Lincoln)**

Hasil Pemilihan Pemilihan Umum 2019, dan Seleksi Calon Pimpinan KPK

Bertempat di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta pada Minggu, 30 Juni 2019, KPU menyelenggarakan rapat pleno KPU dengan agenda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2019. Rapat pleno yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman secara resmi menetapkan pasangan Joko Widodo - Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019 – 2024. Keputusan KPU tersebut ditetapkan secara resmi setelah pada tanggal 27 Juni 2019 Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh dalil permohonan pemohon, yakni pasangan Prabowo – Sandiago yang menyoal putusan KPU tentang hasil penghitungan suara pemilihan presiden. MK juga menyatakan, dalil pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM di pemilu lalu, tidak beralasan menurut hukum karena tidak didukung alat bukti yang valid, tidak relevan dengan kasus yang diperiksa, serta tidak bisa dijelaskan secara hukum.

Atas keputusan tersebut, Joko Widodo menyatakan: "Indonesia Negara besar. Tidak bisa dibangun oleh hanya satu atau dua orang. Saya mengajak Pak Prabowo – Sandi untuk bersama-sama membangun Negara ini. Saya yakin beliau berdua patriot yang menginginkan Negara ini makin maju dan makin makmur. Saya ajak rakyat Indonesia melupakan perbedaan politik yang membelah kita, kita kembali menjadi negeri Pancasila."

Sementara, dalam acara tersebut Prabowo dan Sandiago Uno yang juga peserta Pemlilu Presiden 2019 diwakili Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman. Dalam pernyataannya, Habiburokhman menyatakan: "Kami menghormati proses yang sudah berjalan baik pada tahap rekapitulasi suara oleh KPU ataupun di MK. Kebetulan Pak Prabowo berhalangan hadir, jadi beliau menugasi kami untuk hadir."

Selanjutnya, seusai menerima salinan Surat Keputusan KPU tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih, Habiburokhman kemudian menyalami Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Salinan SK KPU tersebut juga diserahkan kepada MPR, DPR, DPD, MK, MA, Presiden yang diwakili Sekretariat Negara, Bawaslu,

DKPP, dan 16 partai politik peserta pemilu (KOMPAS, 1/07/2019).

Dengan telah ditetapkannya keputusan KPU tentang calon presiden dan wakil presiden terpilih tersebut menandai berakhirnya kontestasi pada pemilu lalu. Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2019 berlangsung pada hari Rabu, 17 April 2019, yang berjalan dengan aman dan lancar. Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, Pemilu 2019 lebih rumit karena dilakukan serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Daerah di seluruh Indonesia.

Hasil rekapitulasi nasional pemilu 2019 diumumkan oleh KPU pada Senin, 20 Mei 2019 pukul 23.30. Pasangan Joko Widodo – Ma'ruf Amin memperoleh 85.036.828 suara (55,41%), sedangkan pasangan Prabowo Subianto – Sandiago Uno memperoleh 68.442.493 suara (44,59%). Sempat terjadi unjuk rasa penolakan dan kerusuhan di beberapa tempat di Jakarta pada tanggal 21 – 22 Mei, namun bisa diatasi oleh aparat keamanan dari Polri dan TNI.

Pasangan Prabowo Subianto – Sandiago Uno selanjutnya secara resmi mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden – wakil presiden tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Jumat, 24 Mei 2019. MK memulai sidang PHPU pada 14 Juni 2019. Setelah beberapa hari bersidang, pada tanggal 27 Juni 2019 MK memutuskan menolak seluruh dalil permohonan pemohon.

Dengan berakhirnya kontestasi pemilu 2019, berbagai lapisan masyarakat berharap agar suasana panas, gejolak dan polarisasi di masyarakat karena perbedaan pilihan dapat diredam. Untuk itu, perlu dilakukan langkah rekonsiliasi dari kedua pasangan kandidat yang bertanding.

Langkah awal rekonsiliasi itu akhirnya

terwujud ketika terjadi pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta pada 13 Juli lalu. Dari stasiun Lebak Bulus, Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto beserta rombongan kemudian dengan menumpang kereta MRT menuju Stasiun Senayan. Dalam perjalanan, tampak Presiden Joko Widodo dan Prabowo bercakap-cakap dengan penuh keakraban.

Sesampai di Stasiun Senayan, kedua tokoh bangsa itu bersama-sama menyampaikan keterangan kepada wartawan dan pendukung. Prabowo dan Jokowi menegaskan bahwa mereka bersahabat. Jokowi dan Prabowo juga bersepakat memulai kebersamaan membangun serta memajukan bangsa. Karena itu, Prabowo dan Jokowi meminta agar para pendukungnya mengakhiri perselisihan. Momen itu juga digunakan Prabowo menyampaikan selamat kepada Jokowi.

Seusai memberikan keterangan pers, keduanya kemudian melangkah menuju salah satu pusat perbelanjaan untuk makan siang di restoran Sate Khas Senayan. Sambil menikmati makan siang bersama, kedua tokoh bangsa itu melanjutkan pembicaraan tentang persatuan Indonesia (KOMPAS, 14 Juli 2019).

Sikap kenegarawan kedua tokoh bangsa itu merupakan hal yang patut digarisbawahi dan diapresiasi. Peristiwa ini adalah langkah awal mengatasi polarisasi di masyarakat. Ya, mari kita bersatu untuk mewujudkan sila ke-3 dari Pancasila: Persatuan Indonesia.

Informasi lain yang perlu diinformasikan adalah proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019 – 2023. Untuk memproses calon pimpinan (capim) KPK tersebut Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden No. 54/P Tahun 2019 yang menetapkan sembilan orang Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Kesembilan orang tersebut adalah: Yenti Ganarsih sebagai ketua merangkap anggota; Indrijanto Seno Aji sebagai wakil ketua merangkap anggota; dan tujuh anggota, yaitu: Harkristuti Harkrisnowo, Marcus Priyo Gunarto, Hamdi Moeloek, Diani Sadia Wati, Mualimin Abdi, Hendardi, dan Al Araf.

Proses pendaftaran capim KPK tersebut telah dimulai sejak tanggal 17 Juni – 4 Juli 2019. Sampai dengan proses pendaftaran ditutup, sebanyak 384 orang telah mendaftar dan akan melalui proses seleksi administratif terhadap para pendaftar. Terkait dengan seleksi administratif, anggota Pansel Capim KPK Hendardi, di Jakarta, 5 Juli 2019 menuturkan, pansel mulai menurunkan

> **Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya.**
> **(Abdurrahman Wahid)**

tim untuk melacak rekam jejak calon yang lulus seleksi administratif, dengan menggandeng berbagai instansi dan mewawancarai orang-orang di lingkungan kerja yang bersangkutan. Publik juga bisa memberikan masukan atas calon yang diumumkan (KOMPAS, 6 Juli 2019).

Nama-nama calon yang lolos seleksi administratif diumumkan pada 11 Juli 2019 lalu. Dari 384 pendaftar, 192 calon dinyatakan lolos seleksi administratif. Di antara nama-nama yang lolos, terdapat tiga komisioner KPK yang kembali mencalonkan diri. Selain itu, ada 13 perwira tinggi Polri, beberapa orang jaksa, juga auditor yang lolos seleksi administratif.

Dengan telah diumumkannya nama-nama calon pimpinan KPK tersebut, Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengajak masyarakat luas untuk menelisik rekam jejak mereka. Berbagai masukan bisa disampaikan melalui surat elektronik atau diserahkan langsung kepada Sekretariat Pansel KPK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Masukan tersebut ditunggu hingga akhir Agustus mendatang. Selain masukan dari masyarakat, juga diharapkan ada masukan dari instansi terkait, seperti KPK, PPATK, BIN, Polri, dan lainnya (KOMPAS, 12/07/2019).

Catatan penting yang perlu digarisbawahi terhadap seleksi capim KPK adalah rekam jejak dari para calon, terutama dalam hal integritas dan profesionalitas dalam memberantas korupsi. Mereka juga harus orang-orang yang jujur, independen, berani menghadapi tekanan, meninggalkan kepentingan pribadi dan sepenuhnya bekerja demi KPK.

(Edwardsyah Nurdin).

Independensi Auditor

Oleh : Awab Jayadi
Auditor Madya pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Ungkapan independensi auditor boleh dikata merupakan istilah sehari-hari yang selalu diingat oleh para auditor. Betapa tidak, independensi auditor adalah salah satu bagian dari standar audit yang harus dijunjung tinggi ketika melaksanakan tugas pengawasan (audit). Ketika melaksanaan audit, seorang auditor harus menerapkan lima konsep utama, dimana salah satunya adalah independensi. Seperti diketahui, lima konsep audit tersebut adalah; bukti (evidence), kehati-hatian dalam pemeriksaan, penyajian yang wajar, independensi, serta etika/perilaku.

Independensi biasanya dimaknai sebagai bersikap netral atau tidak memihak. Namun, pada hakikatnya bersikap netral itu merupakan hal yang sangat sulit bahkan mustahil. Ketika kita dihadapkan pada dua pilihan, yaitu antara yang benar dan yang salah, tentunya kita harus mengambil sikap untuk berpihak. Maka keberpihakan menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari, dalam artian mau tidak mau harus terjadi keberpihakan.

Masalahnya, kepada siapa keberpihakan itu ditujukan? Tentu saja bukan keberpihakan kepada seseorang, kelompok, atau golongan; melainkan keberpihakan di sini dalam artian berpihak kepada hal-hal yang benar. Kemudian, terkait dengan independensi auditor, apa atau siapa yang dimaksud dengan 'hal-hal yang benar' itu?

Terhadap permasalahan tersebut, kita sebagai seorang auditor intern pemerintah tentunya harus merujuk kepada Standar 1100 dari Standar Audit Intern Pemerintah. Merujuk kepada standar tersebut, independensi bermakna sebagai adanya kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan secara objektif. Dalam hal ini independensi auditor merupakan keberpihakan audit pada kebenaran yang faktual, yaitu

kebenaran dengan adanya bukti disertai dengan data yang relevan dan otentik, serta adanya kapasitas tanggung jawab dari wewenang seseorang yang terukur dalam organisasi.

Selain dari pada itu, independensi auditor juga merupakan sikap mental yang harus dipertahankan oleh seorang auditor yang bebas dari pengaruh pihak lain, dan tidak berpihak. Seorang auditor harus lurus tidak berpihak kepada siapapun, selain memihak kepada kebenaran sesuai dengan pertimbangan keahliannya. Dengan demikian seorang auditor dikatakan independen jika dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas, tanpa ada pengaruh dari siapapun, dan objektif.

Terkait dengan kebenaran, pertanyaannya adalah: apa rujukannya tentang 'yang benar' bagi seorang auditor ketika melaksanakan tugas audit? Nah, karena kita adalah auditor internal pemerintah, penulis berpendapat bahwa 'yang benar' itu adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, atau paling tidak pemerintah turut andil dari peraturan tersebut. Dalam hal ini, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya. Dengan demikian, independensi bagi auditor internal pemerintah bukan berarti netral murni tanpa landasan. Tetap ada landasan atau acuan kenetralannya, yaitu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harus diakui, ketika menjalankan tugas audit seorang auditor akan dihadapkan kepada keadaan-keadaan yang mempertaruhkan independensinya. Bagaimana menghadapi tekanan-tekanan akan mencerminkan sikap objektivitas seorang auditor terkait independensinya. Jika tidak teguh memegang prinsip independensi, bisa-bisa auditor dijadikan kuda tunggangan kepentingan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan dari entitas yang diaudit. Pihak-pihak tertentu itu bisa jadi adalah pimpinan, atau pejabat pembuat komitmen, atau pihak ketiga (rekanan proyek).

Terganggunya independensi auditor jelas akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukannya, dan bisa-bisa audit yang dilakukan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, independensi merupakan sikap mental yang sangat diperlukan oleh seorang auditor dalam melakukan tugasnya, sehingga laporan atau opini yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak-pihak yang terkait.

Untuk dapat menjadi auditor yang independen seorang auditor harus benar-benar jujur dan objektif; memiliki integritas dan rasionalitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Di samping itu, seorang auditor juga harus bebas dari kewajiban apapun atau bebas dari kepentingan apapun dari auditi, baik kepentingan manajemen atau kepentingan organisasi. Seorang auditor tidak hanya dituntut harus bersikap bebas sesuai fakta, melainkan juga harus menghindari keadaan-keadaan yang menunjukkan atau membuat pihak lain meragukan kebebasannya.

Ke-independensi-an seorang auditor sangat diperlukan untuk dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. Tentunya, kita berharap dapat menjadi seorang auditor internal pemerintah yang independen. Semoga.

Industri Alas Kaki: Ketika Prospeknya Semakin Cerah

Mencatatkan jumlah produksi mencapai 1,41 miliar pasang sepatu di tahun 2018 lalu, mengantarkan Indonesia menduduki posisi keempat produsen alas kaki di dunia setelah China, India dan Vietnam. Lalu bagaimana prospek ke depan?

Sejatinya produk-produk industri alas kaki, seperti sepatu dan sandal merupakan jenis barang yang diperlukan oleh setiap orang, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan pokok. Apalagi untuk menunjang tuntutan gaya hidup masyarakat perkotaan, di mana kebutuhan akan produk-produk sepatu dan sandal selalu meningkat, tidak lagi sekedar cukup hanya sepasang atau dua pasang, bahkan bisa jadi lebih dari itu. Segmen pasarnya pun tidak terbatas, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa membutuhkan produk-produk alas kaki. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat disertai dengan perubahan gaya hidup dalam masyarakat menjadikan kebutuhan akan produk-produk alas kaki semakin meningkat.

Merujuk pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), jenis-jenis usaha industri alas kaki dikelompokkan pada industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari, industri sepatu olah raga, industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri, dan industri alas kaki lainnya. Industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari mencakup pembuatan alas kaki untuk keperluan sehari-hari, seperti sepatu harian, sepatu santai, sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Sedangkan industri sepatu olahraga mencakup pembuatan sepatu untuk olahraga, seperti sepatu sepak

bola, sepatu atletik, sepatu senam, dan sebagainya.

Kelompok industri sepatu teknik lapangan/keperluan industri mencakup pembuatan sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri, seperti sepatu tahan kimia, sepatu tahan panas, sepatu pengaman. Selanjutnya kelompok industri alas kaki lainnya mencakup usaha pembuatan alas kaki lainnya yang belum termasuk golongan manapun.

Melihat perkembangan kinerja industri alas kaki dalam beberapa tahun terakhir tergambar bahwa prospek industri alas kaki ke depan sungguh sangat menjanjikan. Hal ini ditandai oleh daya saingnya yang terus menanjak di pasar global. Tren laju pertumbuhan kelompok industri alas kaki, kulit dan barang dari kulit menunjukkan angka-angka yang terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2018 kelompok industri tersebut mampu tumbuh 9,42%, naik signifikan dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 2,22%.

Atas pertumbuhan yang signifikan itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenperin.go.id, 2 Mei 2019 menyatakan: "Capaian tahun lalu merupakan pertumbuhan tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Ini tanda juga bahwa iklim usaha di Indonesia masih tetap kondusif seiring dengan tekad pemerintah untuk terus memberikan kemudahan perizinan usaha dan insentif yang menarik." Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa industri alas kaki merupakan salah satu sektor manufaktur andalan yang mendapat prioritas pengembangan dari pemerintah. Hal ini dikarenakan industri alas kaki tergolong industri padat karya dan berorientasi ekspor sehingga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Selain dari pada itu, sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035, industri alas kaki juga ditetapkan sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin Muhdori dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pertengahan Mei lalu menyatakan, sektor industri alas kaki memiliki peran yang strategis, yaitu sebagai penghasil devisa dan sebagai jaring pengaman sosial yang banyak menyerap tenaga kerja. Dewasa ini, sekitar 800.000 orang tenaga kerja terlibat di industri alas kaki, sementara dari sisi perdagangan terus mengalami surplus.

Sumbangsih Industri Alas Kaki

Industri alas kaki di Indonesia telah memberikan sumbangsih nyata dalam pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional. Capaian ekspor kelompok industri alas kaki nasional di tahun 2018 meningkat hingga 4,13 persen atau naik menjadi US$ 5,11 miliar dari tahun sebelumnya (2017) sebesar US$ 4,91 miliar. Demikian pula dengan penyerapan tenaga kerja yang juga mengalami kenaikan, dari 795.000 orang di tahun 2017 menjadi 819.000 orang di tahun 2018.

Terkait dengan kapasitas ekspor industri alas kaki, komoditas besarnya adalah sepatu olahraga yang kontribusinya mencapai 50%. Kemudian diikuti oleh sepatu teknik lapangan/kebutuhan industri serta produk alas kaki kebutuhan sehari-hari. Sementara tujuan utama pasar ekspor produk alas kaki nasional, antara lain ke Amerika Serikat, China, Jepang, dan Belgia. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Indonesia menjadi eksportir ke-6 terbesar dunia untuk produk alas

kaki, setelah China, Vietnam, Jerman, Belgia dan Turki.

Hasil produksi industri alas kaki pun terus mengalami peningkatan. Tahun 2018 lalu produk yang dihasilkan telah menembus hingga 1,41 miliar pasang sepatu. "Kita punya potensi yang cukup besar, dengan jumlah industri alas kaki sebanyak 665 perusahaan, produksi kita sudah menembus hingga 1,41 miliar pasang sepatu atau berkontribusi 4,6 persen dari total produksi sepatu dunia," papar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Melalui capaian tersebut, Indonesia menduduki posisi ke-4 sebagai produsen alas kaki di dunia setelah China, India, dan Vietnam.

Lebih lanjut, Menteri Perindustrian menyatakan rasa optimis akan prospek industri alas kaki di masa mendatang. "Kami juga optimistis, akan terjadi peningkatan ekspor produk alas kaki nasional sampai US$ 6,5 miliar pada tahun 2019 ini; dan menjadi US$ 10 miliar dalam empat tahun ke depan," ujarnya. Hal senada juga diutarakan oleh Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin Muhdori. Menurut Muhdori, prospek industri alas kaki sangat baik karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tenaga kerja yang banyak dan kompeten; serta berpengalaman di bidangnya. Di samping itu, pemerintah juga memberikan dukungan terhadap iklim usaha yang baik; serta adanya investasi baru atau perluasan dengan teknologi yang lebih baik.

Seiring dengan masuknya investor ke Indonesia, industri alas kaki diyakini semakin meningkat kapasitas produksinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri sekaligus menjadi substitusi impor serta mengisi pasar ekspor. Sepanjang tahun 2018 misalnya, investasi di industri alas kaki sebesar Rp 12,8 triliun naik dibanding tahun 2017 yang mencapai Rp 12,1 triliun.

Peningkatan dan Pengembangan

Upaya peningkatan dan pengembangan industri alas kaki di Indonesia merupakan salah satu program prioritas Kementerian Perindustrian. Menurut Muhdori, beberapa program terkait hal tersebut diantaranya adalah peningkatan kualitas bahan baku, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Dalam hal ini dilakukan diantaranya melalui sosialisasi kepada Rumah Potong Hewan (RPH) terkait bahan baku kulit yang baik. Demikian pula dengan ketersediaan dan kontinuitas bahan baku. Di samping itu, Kementerian Perindustrian terus berupaya mengembangkan *brand*/merek dari produk-produk alas kaki nasional. Beberapa merek yang cukup dikenal seperti Tomkins, Brodo, League, Yongki Komaladi dan lainnya.

Pemerintah juga memberikan fasilitas fiskal berupa *Tax Allowance*. Fasilitas fiskal ini diberikan kepada pelaku usaha industri alas kaki yang melakukan penanaman modal, baik investasi baru maupun perluasan, berupa pengurangan pajak penghasilan sebesar 30%. Masa waktu terhadap fasilitas fiskal yang diberikan adalah selama 6 (enam) tahun. Demikian pula terkait dengan restrukturisasi mesin, dalam upaya peningkatan kapasitas produksi dan alih teknologi yang lebih baik.

Sementara itu, untuk pengamanan pasar dalam negeri pemerintah memberlakukan tarif bea masuk produk alas kaki ke Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 30%. Hal ini dapat meningkatkan daya saing produk lokal dalam menghadapi produk-produk dari luar negeri. Di samping itu, pemerintah juga memberlakukan SNI Wajib Sepatu Pengaman. Pemberlakukan SNI Wajib tersebut, selain sebagai perlindungan bagi konsumen juga merupakan hambatan terhadap produk alas kaki luar negeri.

Peningkatan dan pengembangan sektor industri tidak terlepas dari kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia (SDM) industri yang ada. Demikian pula dengan kompetensi dan produktivitas SDM industri alas kaki saat ini telah didukung dengan adanya program vokasi pada unit-unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian, diantaranya melalui program *link and match* industri dengan sekolah menengah kejuruan. Di samping itu, melalui program bimbingan teknik *Trainning Of Trainer* (TOT), sebagai upaya menciptakan tenaga-tenaga kerja profesional yang bersertifikasi agar dapat melatih kembali tenaga kerja baru untuk dapat bekerja di industri alas kaki.

Kementerian Perindustrian juga memiliki unit kerja yang tugas dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengembangan industri alas kaki di Indonesia, yaitu Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Fokus pelayanan yang dilaksanakan oleh BPIPI antara lain peningkatan

> **Dari satu kesalahan ke kesalahan lain, manusia menemukan kebenaran. (Sigmun Freud)**

SDM industri alas kaki, peningkatan pengetahuan dan teknologi produk alas kaki, serta standardisasi produk alas kaki. Saat ini, BPIPI tengah menyelenggarakan Indonesia Footwear Creative Competition (IFCC) 2019 sebagai upaya memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi menumbuhkembangkan industri alas kaki nasional. IFCC 2019 merupakan event yang mengusung konsep *3 in 1 Creative Footwear Competition*, yaitu melalui desain, fotografi dan videografi.

Seiring dengan semakin cerahnya prospek industri alas kaki di Indonesia mendorong minat pelaku usaha untuk berinvestasi pada industri alas kaki di dalam negeri masih cukup tinggi. Hal ini dikarenakan industri ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya adalah segmen pasar produk alas kaki yang sangat tinggi, serta semakin kondusifnya iklim usaha industri yang didukung oleh pemerintah dengan dibuatkannya lahan peruntukan kawasan industri di daerah.

Namun demikian, harus diakui ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh pelaku industri. Menurut Muhdori, beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya berkaitan dengan upah minimum regional (UMR) dimana pelaku usaha industri merasa sensitif dalam menyikapinya. Di beberapa daerah, nilai UMR sangat tinggi sehingga diperlukan relokasi ke daerah yang nilai UMR-nya lebih kompetitif. Permasalahan lain adalah dalam hal perijinan dari pemerintah daerah yang dinilai masih ruwet. Pelaku usaha industri alas kaki juga dihadapkan pada masalah hambatan berupa ketergantungan akan impor bahan baku, bahan pendukung/ penolong, serta mesin produksi yang masih tinggi.

Beberapa permasalahan dan hambatan tersebut tentunya perlu ditangani dengan sebaik-baiknya agar prospek industri alas kaki di Indonesia tetap cerah dan diminati pelaku usaha.

(Edwardsyah Nurdin).

Prospek Industri Alas Kaki

Seperti halnya dengan pakaian, menggunakan alas kaki seperti sepatu atau sandal adalah salah satu kebutuhan dalam menunjang kehidupan yang layak. Tak heran jika Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 memasukkan industri alas kaki sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Prospeknya pun sangat bagus. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang perkembangan dan prospek industri alas kaki dewasa ini, Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI melakukan wawancara dengan Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki Kemenperin, Muhdori pada pertengahan Mei lalu. Berikut petikannya:

Bagaimana gambaran industri alas kaki dewasa ini?

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, Industri alas kaki merupakan salah satu industri prioritas untuk dikembangkan. Hal ini mengingat sektor industri ini memiliki peran yang strategis, yaitu penghasil devisa dan sebagai jaring pengaman sosial yang banyak menyerap tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang terlibat di industri alas kaki sekitar 800.000 orang. Sementara dari sisi perdagangan, sektor industri alas kaki terus mengalami surplus.

Saat ini Indonesia menempati urutan keenam sebagai eksportir alas kaki dunia setelah China, Vietnam, Italia, Jerman dan Belgia.

Bagaimana dengan laju pertumbuhan industri alas kaki beberapa tahun terakhir?

Pertumbuhan industri alas kaki bersama dengan industri kulit dan barang dari kulit sampai akhir tahun 2018 tercatat sebesar 9,42%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 2,22%, dengan kontribusi terhadap PDB nasional pada tahun 2018 sebesar 0,28%.

Nilai ekspornya pun terus mengalami peningkatan. Sampai akhir tahun 2018, nilai ekspor alas kaki Indonesia sebesar US$ 5,11 miliyar atau naik 4,0% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai US$ 4,91 miliyar, dengan surplus perdagangan pada tahun 2018 mencapai US$ 4,36 miliyar atau naik dibandingkan tahun 2017 yang mencapai US$ 4,35 miliyar. Namun pada triwulan I tahun 2019 ini, ekspor alas kaki Indonesia mengalami sedikit penurunan, dimana total nilai ekspor sebesar US$ 1,52 miliyar atau turun 12,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 1,73 miliyar.

Dengan gambaran tersebut, bagaimana prospek ke depan dari industri alas kaki?

Prospek Industri alas kaki sangat baik karena didukung oleh beberapa faktor, diantaranya adalah tenaga kerja yang banyak dan kompeten; berpengalaman di bidangnya; demikian pula Iklim usaha yang didukung oleh Pemerintah; serta adanya investasi baru atau perluasan dengan teknologi yang lebih baik.

Bagaimana kemudahan bahan baku yang dapat diakses oleh industri alas kaki?

Secara garis besar bahan baku utama alas kaki adalah kulit dan tekstil. Untuk bahan baku kulit, Kepala Badan Karantina Pertanian telah menerbitkan keputusan dimana kulit finish yang merupakan bahan baku bagi industri alas kaki sudah tidak diperlakukan proses karantina lagi. Dengan demikian pemasukan bahan baku kulit menjadi lebih mudah. Sedangkan untuk industri alas kaki dengan unsur bahan baku tekstil mengacu kepada Peraturan Menteri Perdagangan No. 85 Tahun 2015 juncto No. 64 Tahun 2017.

Sebagian besar industri alas kaki yang berorientasi ekspor telah memanfaatkan fasilitas Kawasan Berikat (KB) atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), sehingga proses importasi bahan baku lebih mudah dan cepat.

Terkait kompetensi dan produktifitas SDM industri alas kaki saat ini, bagaimana kondisinya?

Kompetensi dan produktivitas SDM industri alas kaki saat ini telah

didukung dengan adanya program vokasi, diantaranya melalui program *link and match* industri dengan sekolah menengah kejuruan, sebagai upaya menyiapkan tenaga kerja lulusan SMK agar siap kerja. Di samping itu, melalui program bimbingan teknik *Trainning Of Trainer* (TOT), sebagai upaya menciptakan tenaga-tenaga kerja profesional yang bersertifikasi agar dapat melatih kembali tenaga kerja baru untuk dapat bekerja di industri alas kaki, serta meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki sebelumnya berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Saat ini kita tengah memasuki era industri 4.0. Khusus untuk industri alas kaki, langkah apa yang dilakukan?

Industri alas kaki merupakan salah satu pionir industri 4.0. Saat ini industri besar sedang mempersiapkan ke arah sana. Ini merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui sistem robotic sebagai bagian dari upaya alih teknologi dan restrukturisasi permesinan.

Bagaimana dengan situasi pasar produk lokal dari industri alas kaki dalam hal persaingan dengan produk luar negeri? Langkah apa yang diperlukan?

Untuk produk yang sejenis, kita masih kalah dengan luar negeri. Ini dikarenakan beberapa faktor, diantaranya bahan baku dan komponen yang sebagian besar masih impor. Untuk itu dapat dilakukan kerjasama investasi antara investor luar negeri melalui PMA dengan investor dalam negeri.

Langkah yang dilakukan untuk pengamanan pasar dalam negeri, diantaranya melalui pemberlakuan ketentuan impor produk alas kaki di pelabuhan tertentu; diberlakukannya Tarif Bea Masuk produk alas kaki ke Indonesia yang cukup tinggi. sebesar 30%. Ini merupakan salah satu hambatan bagi produk luar untuk masuk ke Indonesia. Di samping itu, pemberlakuan SNI wajib sepatu pengaman. Dengan diwajibkannya SNI tersebut, selain sebagai perlindungan bagi konsumen, juga merupakan hamabatan produk dari luar negeri untuk masuk ke pasar dalam negeri.

(Singgih Budiono).

Pengkhianatan Terhadap Profesi Auditor

Oleh : Ali Joto Manalu
Auditor Utama pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Profesi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Istilah profesi merupakan serapan dari bahasa Inggris "profess" yang bermakna "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen". (https://id.wikipedia.org/wiki/Profesi). Dalam memenuhi kewajiban tersebut, suatu profesi juga membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Seseorang yang berkompeten di suatu profesi tertentu disebut profesional.

Terkait dengan profesi, ada artikel menarik yang ditulis oleh Suparman Marzuki, mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) tahun 2013 – 2015 pada Harian Kompas, 13 Mei 2019 dengan judul "Pengkhianatan pada Profesi". Dalam tulisan tersebut, Suparman Marzuki menyoroti penghianatan yang dilakukan oleh para hakim pada profesinya sendiri. Seperti kita ketahui, hakim adalah juga pekerjaan/jabatan profesional yang mempunyai Kode Etik dan Pedoman Perilaku sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009. Isi keputusan bersama ini antara lain adalah integritas, kejujuran dan perbuatan mulia para hakim.

Dalam artikel tersebut, Suparman Marzuki menuliskan bahwa sejak Maret 2012 hingga Mei 2019 terdapat 23 hakim dari lingkungan Mahkamah Agung terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara yang terkena sanksi melalui Majelis Kehormatan Hakim

periode 2009 – 2017 mencapai angka 49 hakim (karier dan *ad hoc)* dengan rincian: 31 orang dipecat dan 18 orang dijatuhi sanksi nonpalu.

Dalam tulisan itu Suparman juga mengkualifikasi tipe hakim menjadi tiga bagian, yaitu tipe Merah, Kuning/Abu-abu, dan Hijau. Hijau diartikan hakim yang tegak lurus dalam arti apapun keadaannya akan kokoh (istiqomah), tidak bisa ditekan atau dipengaruhi siapapun dengan fasilitas apa pun, dan berani berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Yang tipe warna merah kebalikan dari warna hijau akan kokoh di jalan kebatilan, mencari cara menjual kewenangannya untuk mendapatkan "sesuatu". Sementara warnakuning/abu-abu bisa menjadi tipe hijau atau merah tergantung ketua majelis dan anggota serta para pihak yang terlibat.

Bagaimana dengan Auditor

Mencermati tulisan Suparman Marzuki tentang pengkhianatan pada profesi hakim tersebut, menginspirasi saya untuk menulis tentang pengkhianatan terhadap profesi auditor, dalam hal ini auditor pemerintah. Auditor pemerintah adalah juga pekerjaan/jabatan profesi, baik itu auditor eksternal maupun auditor internal, sehingga keberadaannya mirip atau sama dengan hakim. Hanya tugas dan lingkup pekerjaannya saja yang berbeda.

Auditor internal pemerintah juga memiliki organisasi profesi yaitu Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang dibentuk pada 30 Nopember 2012. AAIPI sejauh ini telah menghasilkan tiga produk yaitu: Standar Audit, Kode Etik Auditor dan Pedoman Telaah Sejawat yang berlaku untuk anggota AAIPI dan menjadi acuan para auditor dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan audit.

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Standar Audit, adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor intern pemerintah. Standar Audit ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu: Standar Atribut (*Attribute Standards*), dan Standar Pelaksanaan (*Performance Standards*)

Standar Atribut adalah mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggungjawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit intern, dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. Standar Atribut ini terdiri dari Prinsip-Prinsip Dasar dan Standar Umum. Sedangkan Standar Pelaksanaan adalah menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern. Standar ini dibagi menjadi Standar Pelaksanaan Audit Intern dan Standar Komunikasi Audit Intern. Lingkup kegiatan yang diatur dalam Standar Pelaksanaan ini meliputi Kegiatan Pemberian Jaminan Kualitas (*Quality Assurance Activities)* dan Pemberian Jasa Konsultansi (*Consulting Activities*).

Dalam pelaksanaan tugas pekerjaannya, auditor juga memiliki kode etik tersendiri, yaitu Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (KE-AIPI) yang merupakan pegangan atau pernyataan tentang prinsip-prinsip moral dan nilai yang digunakan oleh auditor sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas audit intern.

Dalam kode etik tersebut diatur prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh seorang auditor yang meliputi: integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel dan

profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Berintegritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran dalam melaksanakan tugasnya; sedangkan objektivitas adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan/pihak lain dalam mengambil putusan atau tindakan.

Dalam kode etik tersebut dijelaskan juga larangan dan sanksi terhadap auditor. Beberapa larangan yang berlaku diantaranya adalah menggunakan data/ informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan, menerima suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi oleh pimpinan APIP setelah mendapat rekomendasi dari Komite Kode Etik yang meliputi sanksi ringan, sedang dan berat.

Tipe Auditor

Kalau mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki menyebut ada tiga tipe hakim, yaitu hakim merah, kuning/ abu-abu dan hijau, maka tipe tersebut dapat juga dikenakan kepada auditor, namun dengan praktik yang berbeda. Untuk tipe auditor warna merah, ketika melakukan tugas audit dia akan berusaha keras mencari kesalahan/ temuan dari entitas yang diaudit; atau dengan kata lain "mencari-cari kesalahan" tanpa mempertimbangkan penyebab/argumentasi dari entitas yang

menyebabkan kesalahan itu terjadi. Selanjutnya, setelah ada temuan maka sang auditor tersebut akan melakukan pendekatan untuk melakukan proses "penghilangan" temuan. Tentunya proses tersebut dilakukan setelah ada kesepakatan pemberian "imbalan" tertentu. Perilaku yang demikian merupakan pengkhianatan terhadap profesi auditor, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip-prinsip independensi dan objektivitas audit.

Auditor tipe hijau merupakan kebalikan dari auditor tipe merah, di mana dia bekerja dengan tulus dan melihat dengan detail berbagai aspek dari entitas yang diaudit. Kemudian, aabila ada sesuatu masalah yang dijumpai maka auditor akan berusaha mendalami mengapa suatu masalah/ temuan tersebut bisa terjadi; dan apakah kesalahan itu disengaja ataukah karena faktor ketidaktahuan atau kekhilafan yang tidak disengaja. Faktor-faktor tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan temuan, selanjutnya dia akan memberikan solusi bagaimana pemecahannnya melalui rekomendasi yang diberikan. Auditor tipe hijau ini tentu saja tidak akan mau menerima, bahkan menolak "imbalan" apa pun dari auditan karena dia berpegang teguh pada prinsip-prinsip dalam kode etik auditor.

Sedangkan auditor kuning/abu-abu sangat tergantung pada situasi di sekitarnya. Auditor tipe ini bisa menjadi merah apabila pimpinan tim audit, misalnya Pengendali Teknis atau Ketua Tim, mengisyaratkan mencari celah memperoleh "imbalan"; atau menjadi hijau apabila pimpinan tim audit adalah auditor tipe hijau. Namun dalam prakteknya, seorang auditor dapat bermain sendiri dengan auditan jika ada indikasi temuan yang cukup signifikan tanpa melaporkan kepada Ketua Tim atau Pengendali Teknis; dan secara diam-diam yang bersangkutan melakukan "pendekatan" dengan auditan untuk tidak mengungkap indikasi kasus tersebut dengan imbalan tertentu.

Sebagai penutup, ada baiknya kita bertanya kepada hati nurani kita sendiri: termasuk tipe apakah ke-auditor-an saya? Harapannya, mudah-mudahan kita termasuk auditor tipe hijau, yang kompeten dan berintegritas. Atau paling tidak, kita sedang menuju ke arah sana.

> **"Kata yang paling indah di bibir umat manusia adalah kata 'Ibu', dan panggilan yang paling indah adalah 'ibuku'. Ini adalah kata yang penuh harapan dan cinta, kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati.**
> **(Khalil Gibran)**

SMK - SMTI Pontianak: Lulusan yang Kompeten dan Siap Kerja

Setelah lima tahun pemerintah fokus membangun infrastruktur, mulai tahun 2020 pemerintah ingin memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini dimaksudkan agar SDM Indonesia mampu berkompetisi dengan negara lain, apalagi mengingat semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi pada era industri 4.0 dewasa ini. Prioritas pembangunan SDM tersebut akan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah (RKP) di tahun 2020 mendatang.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga telah mengantisipasi hal tersebut melalui pengembangan unit-unit pendidikan yang berada di bawah naungannya, dimana sejak tahun 2016 lalu pengembangan sekolah menengah kejuruan di lingkungan Kemenperin adalah berbasis kompetensi yang *link and match* dengan industri.

Salah satu unit pendidikan di lingkungan Kemenperin adalah Sekolah Menengah Kejuruan – Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMK-SMTI) Pontianak, yang diharapkan sebagai *role model* pendidikan kejuruan industri berbasis kompetensi dan mampu menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing. Untuk itu, SMK-SMTI Pontianak merumuskan visi ke depan, yaitu "Lulusan Unggul, Berimtaq, Mandiri, Berdaya Saing Global, dan Berwawasan Lingkungan ". Visi tersebut diterjemahkan dalam misinya, yaitu: melaksanakan pendidikan yang berkualitas, berkarakter kebangsaan dan berwawasan lingkungan; membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang memiliki kecerdasan emosional, intelektual, spiritual dan sosial; mengembangkan unit usaha sekolah dalam rangka menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi siswa; serta mengembangkan jejaring kerjasama dengan dunia industri dan masyarakat dalam mengembangkan sumberdaya unggulan.

SMK-SMTI Pontianak berdiri sejak tahun 1968 dengan nama Sekolah Teknologi Menengah Atas (STMA). Oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, sekolah ini diserahterimakan pengelolaannya kepada Kementerian Perindustrian. Awalnya hanya ada dua jurusan di sekolah ini, yaitu jurusan Kimia dan jurusan Teknik Permesinan.

Kemudian, seiring dengan perjalanan waktu mengisyaratkan kebutuhan industri terhadap tenaga analis kimia, khususnya di Kalimantan Barat, terus berkembang. Oleh karena itu, sejak tahun 2017 jurusan Kimia dibagi menjadi dua, yaitu Kimia Industri dan Analis Pengujian Laboratorium.

"Jurusan Teknik Permesinan diarahkan kepada penguasaan terhadap mesin-mesin dalam industri," tutur Kepala SMK-SMTI Pontianak Dra. Sih Parmawati, MM kepada Redaksi Majalah SOLUSI pada akhir Mei lalu. "Sementara jurusan Kimia Industri diarahkan kepada pekerjaan proses produksi. Sedangkan untuk jurusan Analis Pengujian Laboratorium diarahkan kepada pekerjaan di laboratorium kimia."

Kompeten dan Siap Kerja

Berlokasi di jalan Sulawesi Dalam No. 31, Pontianak, SMK-SMTI Pontianak mengusung motto selaras dengan visi dan misi yang diembannya, yaitu: "Kreatif, Inovatif, Kompeten, dan Siap Kerja". Motto tersebut senantiasa dikumandangkan oleh para siswa ketika akan memulai pembelajaran dan praktik kerja. Ada tiga jurusan sekolah ini, yaitu: Teknik Permesinan; Kimia Industri; dan Analisis Pengujian Laboratorium.

Jumlah siswa data terakhir Mei 2019 pada jurusan Teknik Permesinan dari kelas X – XII seluruhnya sebanyak 363 siswa, sedangkan jurusan Kimia Industri berjumlah 220 siswa, dan jurusan Analisis Pengujian Laboratorium jumlah siswa sebanyak 81 siswa. Kompetensi dari jurusan Teknik Permesinan mengarah pada pekerjaan yang berkaitan dengan alat ukur, gamtek manual, perkakas tangan, pengelasan, gambar manufaktur, pembubutan, frais, dan *Computer Numerical Control (CNC)*.

Sedangkan kompetensi dari jurusan Kimia Industri meliputi hal-hal yang berkaitan dengan proses dalam industri kimia, alat industri kimia, pekerjaan dasar laboratorium kimia, operasi teknik kimia, serta produk kreatif berbasis kimia. Sementara pada jurusan Analisis Pengujian Laboratorium kompetensinya meliputi pengujian kimia dengan bermacam teknik dan metode, pengujian manual sampai digital, dan analisis pengujian laboratorium.

Sebagai sekolah kejuruan yang berbasis *link and match* dengan industri maka model pembelajaran yang diterapkan adalah *teaching factory*, yakni model pembelajaran yang berbasis produksi yang mengacu kepada standard dan prosedur yang berlaku di industri. Di samping itu juga telah dilengkapi dengan Tempat Uji Kompetensi (TUK) serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi kompetensi untuk seluruh siswa. *Teaching factory* utamanya diterapkan pada jurusan Teknik Permesinan dan Kimia Industri sehingga produk-produk yang dihasilkan para siswa pun berupa produk-produk mesin industri dan produk kimia industri. Produk mesin industri seperti *tool rack*, *tool box*, mesin kultivasi multiguna, alat angkut perkebunan dan lain-lain. Sedangkan produk kimia industri yang dihasilkan para siswa antara lain berupa produk berbasis karet alam (busa bantal, aneka boneka, matras), produk olahan sabut kelapa, produk olahan dari kelapa dan kelapa sawit seperti sabun, VCO dan lain-lain, dan olahan biji karet menjadi minyak bio diesel.

Dari aspek kurikulum pendidikan, SMK-SMTI Pontianak menerapkan sistem ganda (*dual system*), dimana pendekatan dalam pembelajaran tidak hanya belajar

teori semata, namun lebih menekankan pada praktik lapangan. Untuk itu, para siswa belajar di sekolah dan praktik kerja lapangan di perusahaan-perusahaan industri terkait. Dalam hal ini, selama 3 semester siswa belajar di sekolah, 2 semester melaksanakan praktik kerja di industri, selanjutnya 1 semester kembali ke sekolah dalam rangka menempuh ujian nasional dan ujian kompetensi.

Menariknya, siswa yang mengikuti praktik kerja di industri diperlakukan seperti pegawai perusahaan. Mereka diberikan tempat penginapan oleh perusahaan dan diberi gaji yang cukup memadai walau tidak sebesar gaji pegawai perusahaan.

"Alhamdulillah, dalam program (*dual system*) ini, siswa ditanggung tempat tinggalnya (ketika praktik kerja), diberi gaji walau tidak sama dengan gaji karyawan," tutur Kepala SMK-SMTI Pontianak terkait dengan praktik kerja tersebut. "Bahkan perusahaan pun siap menerima mereka bekerja setelah lulus nanti," tambahnya.

Dalam hal jaminan kerja di perusahaan industri setelah para siswa lulus sekolah, dengan semangat Sih Parmawati menuturkan: "Tahun lalu saja permintaan dari perusahaan ada 800 lowongan kerja, sementara lulusan kami hanya 116 siswa saja."

Untuk pelaksanaan praktik kerja di perusahaan industri tersebut, pihak sekolah telah membuat MoU dengan beberapa perusahaan industri, yaitu: PT. Team Metal Indonesia di Batam, PT. Aftech Rand Perkasa di Cikarang, PT. Yusamasu Tech Indonesia di Cikarang, PT. Banshu Rubberindo di Purwakarta, dan PT. Yogya Presisi Teknikatama Industri di Yogyakarta.

Pada umumnya, sekitar 85% lulusan SMK-SMTI Pontianak segera mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan industri begitu menyelesaikan pendidikannya. Sementara sisanya melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi atau menjadi wira-usaha. Tak heran jika sekolah ini banyak yang meliriknya. Jika tahun-tahun sebelumnya ratio jumlah penerimaan siswa baru dibandingkan dengan jumlah pendaftar adalah 1 : 2, maka pada tahun 2018 lalu ratio perbandingan tersebut meningkat

menjadi 1 : 3.

Dukungan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung sistem pendidikan dan pengajaran, pihak sekolah menyediakan fasilitas laboratorium dan workshop yang cukup memadai. Di antaranya adalah Workshop Mekanik I dan II. Pada Workshop Mekanik I tersedia beberapa mesin bubut, pres, bor, potong dan lain-lain yang dimanfaatkan oleh para siswa kelas 2 dalam praktik pembuatan produk sekaligus mengenal permesinan serta adaptasi situasi di pabrik. Sedangkan Workshop Mekanik II dimaksudkan sebagai tempat pembelajaran praktik siswa kelas 1. Di sini siswa diberikan pemahaman konsep penggunaan alat ukur pembanding dan atau alat ukur dasar, alat ukur mekanik presisi, strategi penggunaan perkakas, pengelasan, pekerjaan plat, dan sebagainya. Ketika praktik di workshop, para siswa diperkenalkan dengan suasana pabrik yang sebenarnya, antara lain tentang keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja (K3), kedisiplinan, kebersihan dan lain-lain.

Fasilitas lainnya adalah peralatan CNC (*Computer Numerical Control*) dan *Manufactur Design*. CNC merupakan sistem otomasi mesin perkakas yang dioperasikan oleh perintah yang diprogram secara abstrak dan disimpan di media penyimpanan. Program CNC lebih dikenal sebagai *G-Code* yang dikirim via *flashdisc* dan selanjutnya dieksekusi oleh prosesor pada mesin CNC yang menghasilkan pengaturan motor servo pada mesin untuk menggerakan perkakas melakukan proses permesinan hingga menghasilkan produk sesuai program.

Peralatan CNC ini tergolong canggih dan mahal harganya, namun SMK-SMTI Pontianak sudah memiliki 6 unit yang terdiri dari 3 unit jenis Milling, 2 unit jenis bubut dan 1 unit jenis wire cut. Hal tersebut dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja untuk menyongsong era revolusi industri 4.0.

Untuk workshop kimia industri, tersedia beberapa peralatan laboratorium kimia sebagai sarana bagi para siswa mempraktikkan teori-teori yang diajarkan. Peralatan laboratorium kimia tersebut diantaranya adalah Destilasi Skala Industri, *Evaporasi, Grinding Sizing, Ekstraksi, Ion Exchanger,* dan lainnya. Sementara, untuk keperluan praktikum bagi jurusan Analisis Pengujian Laboratorium, tersedia beberapa laboratorium, seperti: Laboratorium Dasar kerja Kimia; Laboratorium Analis Konvensional; Laboratorium Analisis Mikrobiologi; serta Laboratorium Analisis Instrumentasi.

Terkait dengan peralatan laboratorium kimia, harus diakui masih belum mencukupi baik dalam hal jenis maupun jumlahnya. Untuk itulah pada tahun anggaran ini pihak sekolah akan menambah beberapa jenis peralatan laboratorium kimia yang dibutuhkan. Walaupun peralatan laboratorium masih terbatas, nyatanya para siswa dari jurusan kimia industri sudah dapat berprestasi; yaitu dalam penelitian pembuatan bahan pengawet makanan non formalin, menggunakan bahan herbal yang ramah lingkungan dan kesehatan, dalam hal ini dari ekstrak daun api-api. Dari hasil pengamatan praktik, tahu yang direndamkan ekstrak daun api-api dengan perbandingan 1:7,5 dapat bertahan selama kurang lebih 36 jam.

Pendidikan Online

Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi

dewasa ini, SMK-SMTI Pontianak juga memanfaatkannya dengan mengaplikasikan pendidikan secara *online*, dimana para siswa tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran walaupun sedang tidak berada di sekolah. Dalam hal ini pengajar dan siswa dapat terus mengikuti proses belajar dan mengajar melalui jaringan internet. Ketika siswa sedang menjalani praktik kerja di perusahaan, misalnya, dia tetap bisa mengakses pelajaran-pelajaran yang diberikan di sekolah. Demikian pula guru dan pihak sekolah, walaupun dari jarak berjauhan namun tetap dapat memonitor kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh siswa.

Sistem pendidikan secara online tersebut bahkan telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. "Tahun 2018 lalu kami mendapat penghargaan sebagai sekolah model sistem pendidikan berbasis online dari Kemdikbud," papar Sih Parmawati.

Di samping itu, SMK-SMTI Pontianak juga berhasil memperoleh penghargaan lain yang cukup bergengsi. Di antaranya, penghargaan sebagai unit kerja yang memberikan pelayanan terbaik di lingkungan Kemenperin; demikian pula dari Pemda Provinsi Kalimantan Barat memberikan penghargaan atas keberhasilan sekolah dalam mengembangkan alat-alat pertanian.

Hal lain yang patut diapresiasi, sekolah ini selalu memperoleh rangking pertama pada ujian nasional untuk sekolah menengah kejuruan di Provinsi Kalimantan Barat. Termasuk keren, kan? *(SB/Gsn/EN).*

Gandhi:
Sang Pengawas yang Melegenda

Bagi para auditor, khususnya di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mendengar nama Gandhi tentulah bukan hal yang asing. Boleh dikata, beliau adalah sosok sang pengawas yang namanya telah melegenda. Apalagi beliau adalah Kepala BPKP yang pertama ketika lembaga pengawasan intern pemerintah itu dibentuk pada tahun 1983, sebagai pengganti dari Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang ketika itu berada di bawah naungan Departemen Keuangan.

Melegendanya nama Gandhi tidak terlepas dari kejujuran, integritas dan keberaniannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan keuangan negara. Walau sosoknya murah senyum namun beliau tetap teguh dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang objektif dan transparan. Berbagai godaan dan ancaman dalam melaksanakan tugas pengawasan, tak membuatnya kendor atau patah semangat.

Suatu saat – di sekitar era 1970-an - Gandhi pernah digoda dengan iming-iming hadiah mobil Mercedes. Ketika itu dia menjadi salah seorang anggota tim perancang undang-undang tentang Pertamina sebagai salah seorang wakil

dari Departemen (sekarang Kementerian) Keuangan. Pembuatan rancangan undang-undang itu merupakan rekomendasi dari Komisi Empat, sebuah lembaga anti korupsi ketika itu. Ternyata di dalam tim tersebut muncul dua kubu yang saling berlawanan, yakni kubu pertama yang memihak Pertamina; dan kubu kedua yang dimotori oleh Gandhi dan Emil Salim (wakil dari Bappenas). Kubu pertama menghendaki RUU yang memberikan keleluasaan kepada Pertamina, dan segala hasil perminyakan digunakan untuk membangun perminyakan, baru jika ada sisanya dimasukkan ke dalam APBN. Kubu kedua menghendaki RUU yang secara ketat mengatur segala hasil dari perminyakan agar lebih banyak masuk ke kas negara yang yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan nasional, dan untuk Pertamina hanya dapat bagian dari usahanya.

Dalam pembahasan RUU terjadi pertentangan di antara kedua kubu yang semakin memuncak. Di tengah proses pembahasan, ternyata ada yang coba menyuap Gandhi. Mula-mula dengan memberi amplop berisi uang yang ditolaknya mentah-mentah. Upaya penyuapan terus berlanjut sampai diiming-iming dengan hadiah mobil Mercedez Benz. Bahkan, yang mengiming-imingi hadiah tersebut adalah salah seorang keponakan Gandhi sendiri yang kebetulan bekerja di Departemen Pertambangan. Sang keponakan sempat menunjuk dua buah mobil Mercedez Benz yang masih baru di pelataran parkir gedung Pertamina. Menurut sang keponakan, kedua mobil akan diberikan kepada Gandhi dan Emil Salim jika mereka mengikuti saja kemauan pihak Pertamina dan tak perlu mempertahankan prinsip.

Mendengar tawaran sang keponakan, Gandhi dongkol dan geram sekali. Setengah emosi dan marah dia berkata: "Sudahlah! Kamu tak usah memikirkan saya. Saya ini sudah kepalang tanggung untuk menegakkan benang yang basah. Saya memang harus begini, tidak bisa diubah lagi!" Mendengar itu sang keponakan langsung diam, dan segera pergi takut kena marah lebih banyak lagi.

Cerita tentang iming-iming hadiah Mercedez Benz dan penolakannya itu kemudian hari diceritakan Gandhi kepada Emil Salim. Mendengar cerita itu, Emil Salim merangkul Gandhi seraya berkata, "Prinsip Bappenas dan Keuangan selalu satu. Tidak bisa ditawar , walaupun diberi Mercedez sekalipun".

Menjadi Piatu Sejak Bayi

Hanya berselang beberapa hari dari kelahirannya pada 25 Desember 1931 di Pandeglang, Banten, Gandhi telah menjadi anak piatu ditinggal ibunya yang meninggal dunia karena sakit. Khawatir terhadap nasib sang bayi maka perawatannya kemudian diambil alih oleh kakek dan nenek dari pihak ibu yang menetap di Kasomalang, sebuah desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sang kakek, Haji Abdullah hanyalah seorang petani yang sederhana, namun keras kemauannya untuk menyekolahkan cucunya itu setinggi mungkin sampai mendapat gelar sarjana. Pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama dilalui Gandhi di Subang, selanjutnya dia meneruskan pendidikan SMA di Bandung.

Kemauan keras dari sang kakek serta semangat belajar yang dimiliki Gandhi ternyata tidaklah sia-sia. Gandhi berhasil meraih gelar Sarjana Akuntan dari Fafultas Ekonomi Universitas Indonesia

pada tahun 1961, setelah sebelumnya dari tahun 1953 – 1956 dia mengikuti Kursus Djabatan Adjun Akuntan (KDAA) di Bandung, sebuah lembaga pendidikan setingkat akademi yang diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.

Dengan mengikuti KDAA pada saat itu maka para siswa secara otomatis langsung diangkat sebagai pegawai negeri di lingkungan Departemen Keuangan yang memang sedang membutuhkan tenaga-tenaga ajun akuntan. Selama mengikuti pendidikan di KDAA, ternyata ada nilai-nilai yang sering ditanamkan oleh Direktur KDAA ketika itu, Prof. Schuil, seorang perempuan keturunan Belanda. Prof. Schuil selalu mengajarkan bagaimana caranya membereskan korupsi. Tak heran jika Gandhi dan teman-teman seangkatannya bercita-cita ingin membereskan korupsi. Dalam perbincangan sehari-hari mereka selalu membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kejujuran, objektivitas, independensi, menertibkan keuangan negara, dan membereskan korupsi. Nilai-nilai tersebut telah menjadi kode etik bagi akuntan; dan ternyata begitu kuat tertanam dalam jiwa seorang Gandhi.

Tak lama setelah berhasil memperoleh gelar Sarjana Akuntan dari FEUI, pada tahun 1962 Gandhi ditugaskan ke Jayapura, Irian Barat, untuk diperbantukan pada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebuah badan pelaksana sementara PBB yang dibentuk karena terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda dalam permasalahan status Irian Barat. UNTEA melaksanakan tugasnya sampai tahun 1963 menyusul penyerahan kedaulatan Irian Barat sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia. Namun Gandhi tetap ditugaskan di Irian Barat untuk menjabat sebagai Kepala Kantor Akuntan Negara dan Kepala Kantor Departemen Keuangan Provinsi Irian Barat.

Semasa menjalankan tugas di Irian Barat, Gandhi mendapatkan jodohnya. Dia menikah dengan Louisa Magdalena Lapian, SH, yang ketika itu adalah dosen pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Jejak Karier Sang Pengawas

Dengan latar belakang pendidikan akuntan, jejak karier Gandhi sebagian besar berada di lingkup kerja bidang pengawasan keuangan negara. Setelah beberapa tahun berkarier dalam lingkup jabatan akuntan negara, tahun 1967 Gandhi diangkat menjadi Inspektur Jenderal Departemen Keuangan. Boleh dikata, ini adalah awal karier Gandhi sebagai Sang Pengawas.

Hanya setahun Gandhi menjabat sebagai Inspektur Jenderal. Tahun 1968 dia ditunjuk menjadi Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN). Ketika itu pembentukan DJPKN - yang juga di bawah naungan Departemen Keuangan – dimaksudkan agar ada semacam jabatan seperti inspektorat jenderal namun dengan lingkup tugas yang lebih luas. Jika inspektorat jenderal hanya mengawasi intern suatu departemen atau lembaga pemerintah maka DJPKN – yang dibentuk pada tahun 1966 - bertugas mengawasi semua keuangan dan kekayaan negara yang terdapat di seluruh departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, sampai ke BUMN/BUMD.

Pada awal Pembangunan Lima Tahun tahap pertama (Pelita-I) di era Orde Baru (tahun 1969 – 1974), DJPKN lebih

terfokus pada kegiatan inventarisasi administrasi keuangan. Saat itu banyak instansi pemerintah, pimpinan proyek, dan bendaharawan yang tidak mengerti administrasi keuangan dan pengelolaan anggaran. DJPKN juga memeriksa proyek-proyek Pelita, dengan fokus pada administrasi keuangan, ketertiban dan ketaatan pada peraturan. Dari hasil pemeriksaan, banyak ditemukan obyek yang diperiksa masih kurang baik, administrasi keuangan masih kacau, tidak ada pelaporan pertanggungjawaban proyek dan banyak pertanggungjawaban yang fiktif.

Semasa menjabat sebagai Dirjen DJPKN, Gandhi sering mengikuti sidang kabinet, dan ketika itu banyak sindiran dan ejekan dari para menteri. Tapi Sang Pengawas itu tidak ambil peduli, yang penting mereka mau diperiksa. Yang jelas, berkekuatan 1200 tenaga akuntan di tahun 1980/1981, DJPKN sudah menatar sekitar 1600 kepala proyek dan bendaharawan di seluruh Indonesia; dan telah memeriksa sekitar 5700 proyek.

Gandhi berkiprah di DJPKN sampai tahun 1983. Pada tahun itu juga, DJPKN dibubarkan dan dibentuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana seluruh tugas dan fungsi DJPKN diambil alih oleh BPKP. Demikian pula dengan Gandhi yang langsung ditunjuk sebagai Kepala BPKP yang pertama.

Ada cerita bagaimana awal mula dibentuknya BPKP. Sebelumnya, Presiden Soeharto pernah berkata pada Gandhi: "Saya ingin mempunyai alat yang independen terhadap semua Menteri." Dan itu diwujudkan oleh Presiden Soeharto dengan menerbitkan Keppres No. 31 Tahun 1983 tentang BPKP. Gandhi menjabat sebagai Kepala BPKP sampai dengan tahun 1993. Setelah itu dia diangkat sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BEPEKA-RI).

Menjadi sosok sang pengawas yang jujur dan berintegritas, bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan, tekanan, penolakan, bahkan ancaman dari berbagai penjuru. Apalagi di era orde baru, ketika kekuasaan demikian kokoh mencengkeram; dan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme bersimaharajalela di balik kekuasaan itu. Namun Gandhi sebagai sang pengawas tetap teguh berjalan di atas rel pengawasan sebagaimana harusnya. Dia tetap berjalan lurus dan tak gentar dalam memberantas korupsi.

Sebagai contoh, ketika di tahun 1991 Gandhi melaporkan hasil pemeriksaan BPKP terhadap Badan Urusan Logistik (BULOG) kepada Wakil Presiden Soedharmono. Dalam laporannya, Gandhi menyatakan bahwa BULOG selalu memperoleh disclaimer terus-menerus selama empat tahun. Mendengar laporan itu, Soedharmono menegur Kepala BULOG yang ketika itu dijabat oleh Bustanil Arifin. Bustanil tentu saja marah kepada Gandhi.

Puncak kemarahan itu dilontarkan oleh Bustanil kepada Gandhi pada suatu rapat para pejabat BULOG seluruh Indonesia yang juga dihadiri Gandhi. Dalam rapat itu Bustanil bicara: "Kita ini sedang disorot di mana-mana. BULOG jago karena kita tidak pernah kekurangan beras. Harga beras tetap stabil. Eh, tiba-tiba datang orang ini (sambil menunjuk ke arah Gandhi) yang memukul kepala kita dari belakang. Sehingga BULOG sempoyongan ...."

Mendengar itu, Gandhi menjawab dengan tenang. "Yang bagus, saya tidak memukul dari belakang tapi dari depan. Tapi bila Bapak-Bapak merasa dipukul dari belakang, itu terserah. BULOG itu anak emasnya Pak Harto. Soeharto itu bos saya, mau marah, mau memecat saya, ya silahkan ..." Lalu Gandhi menjelaskan, bahwa BULOG memang berhasil melaksanakan tugas pokoknya, mewujudkan stabilitas harga sembilan bahan pokok dan penyedia stok pangan nasional. Tapi, jika secara administratif diperiksa oleh akuntan maka hasilnya selalu berbunyi *disclaimer* atau tidak bisa memberikan pendapat. Artinya, sistem administrasinya masih ruwet dan tidak tertib sehingga perlu dibereskan.

Dalam hal profesionalitas pengawasan Gandhi adalah seorang yang teguh pada pendirian sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan yang berlaku. Hanya kepada atasannya - dalam hal ini Presiden - dia terpaksa mengalah. Walau mengalah, namun kebenaran tetap disampaikannya: sesuatu yang sangat langka ketika budaya "ABS" (Asal Bapak Senang) adalah hal yang biasa di era itu.

Salah satu contoh adalah ketika Gandhi melaporkan hasil pemeriksaan BPKP terhadap kredit-kredit investasi yang diperoleh Liem Sioe Liong, pengusaha papan atas yang dekat dengan Presiden Soeharto. Ketika itu, Liem Sioe Liong banyak memperoleh kredit investasi dari luar negeri, baik berupa investasi modal ataupun peralatan. Namun kredit investasi tersebut tidak dikenakan pajak atau bea masuk.

Apa jawaban Soeharto ketika menerima laporan itu? "Liem Sioe Liong adalah satu-satunya orang Indonesia yang dipercaya untuk mendapat kredit investasi dari luar negeri. Kenapa kita harus memusuhinya, seharusnya kita dukung. Janganlah Liem Sioe Liong dikenakan pajak atas kredit investasinya," kata Soeharto. Mendengar jawaban itu, Gandhi tak berkutik. "Ya, terpaksa mundur teratur."

Atas jasa dan pengabdiannya yang luar biasa, Gandhi memperoleh beberapa tanda penghargaan, diantaranya Satya Lencana Karya Satya dan Bintang Mahaputra Utama. Dan ketika wafat pada Senin, 4 Januari 2010 beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Semua perolehan itu merupakan penghargaan negara bagi Sang Pengawas.

(Edwardsyah Nurdin)
Refrensi: Buku "DR. Gandhi Sang Pengawas" oleh Syah Mardi.

"Kepedulian terhadap kehidupan manusia dan kebahagiaan, dan bukan kehancuran mereka, adalah hal pertama dan satu-satunya objek pemerintahan yang baik.
(Thomas Jefferson)

Mencegah Suap melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Oleh : Edwin Darmawan
Auditor Madya pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Praktik suap-menyuap sebagai jenis atau modus dari tindak pidana korupsi sering terjadi di sekeliling kita. Boleh dikata, penyuapan merupakan praktik korupsi terbesar yang sering kita temui belakangan ini. Bahkan, dulu ada ungkapan yang menyatakan "Suap atau korupsi adalah olie pelicin bagi pembangunan". Dan bermacam-macam jenis suap yang bisa kita temukan, mulai dari suap tender/lelang, suap peradilan/ hukum, suap jabatan, suap perijinan dan suap-suap lainnya. Dalam tahun 2018 saja, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 178 kasus korupsi, dan dari jumlah tersebut 152 perkara atau 85,39% di antaranya adalah kasus penyuapan (detik.com, 19/12/2018).

Penyuapan dalam hal ini diartikan sebagai tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan dengan maksud untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan/minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap mendefinisikan suap sebagai tindakan "memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum"; juga "menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum". Korupsi yang terkait dengan suap menyuap diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi, praktik suap yang banyak terjadi jelas memberikan dampak buruk terhadap berbagai lapisan

kehidupan. Praktik suap-menyuap dapat menimbulkan dampak negatif terhadap masalah sosial, ekonomi dan politik. Dampak lainnya adalah rusaknya tatanan kepemerintahan, menghambat perkembangan dan mendistorsi persaingan dunia usaha, mencederai tatanan hukum dan rasa keadilan masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) maka praktik suap-menyuap harus dilawan dan diberantas.

Beberapa waktu lalu, telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Instruksi presiden tersebut sebagai revisi dari Peraturan Presiden 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Dalam instruksi presiden tersebut, Badan Sertifikasi Nasional (BSN) mendapat amanah untuk melakukan inisiasi sertifikasi anti korupsi. Untuk itu, BSN telah menyusun Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SNI ISO 37001:2016). Standar ISO 37001 merefleksikan tata kelola internasional yang baik dan dapat digunakan dalam semua yurisdiksi. Standar ini berlaku untuk berbagai organisasi pada semua sektor, termasuk sektor publik, swasta, dan nirlaba. Sedangkan tujuan dari disusunnya sistem ini adalah untuk membantu organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani praktik penyuapan serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan.

Prinsip-prinsip SNI ISO 37001

Dalam mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang merujuk pada ISO 37001 tersebut, ada enam prinsip dasar yang harus diterapkan. Keenam prinsip tersebut meliputi: proporsional prosedur, komitmen pimpinan, manajemen risiko, due dilligence (uji kepatutan), komunikasi, dan monitoring dan evaluasi.

Prinsip proporsional prosedur mengarah kepada kebijakan dan prosedur yang diberlakukan oleh suatu organisasi harus proporsional dengan risiko penyuapan yang dihadapi. Penerapannya disesuaikan dengan budaya dan lingkup organisasi agar mencapai tujuan mencegah penyuapan. Untuk risiko terjadinya penyuapan yang signifikan, maka diperlukan prosedur lebih luas dan metode yang detail, termasuk prosedur analisis risiko dan uji kepatutan.

Untuk mengimplementasikan SMAP secara konsisten maka komitmen dari pucuk pimpinan (top management) mutlak harus dilaksanakan. Dalam hal ini kepemimpinan yang efektif kepada pencegahan penyuapan disesuaikan dengan ukuran organisasi, struktur manajemen dan keadaan saat itu. Pimpinan dapat menjaga kebijakan organisasi agar dilaksanakan, dikomunikasikan kepada vendor, dan menjamin hasil analisis risiko.

Selanjutnya terkait dengan manajemen risiko. Berdasarkan stakeholder yang terkait dan isu internal maupun eksternal, organisasi melakukan analisis terhadap kemungkinan risiko dan didokumentasikan. Dalam hal ini banyak katagori menyangkut risiko, seperti risiko negara, risiko sektor, risiko transaksi dan sebagainya. Untuk itu, kompleksitas metode yang digunakan diambil dari maturitas organisasi.

Uji Kepatutan (*due diligence*) merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap proses/personil/unit kerja yang memiliki nilai risiko di atas rendah. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk

memastikan tidak terjadinya praktik suap di lingkup organisasi itu sendiri. Prinsip selanjutnya adalah komunikasi yang efektif, yang mengatur bahwa setiap persyaratan standar harus dapat dikomunikasikan sesuai peruntukannya. Hal yang wajib dikomunikasikan adalah kebijakan anti suap dan dokumentasi kepada internal dan eksternal.

Terakhir adalah monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan SMAP secara berkala. Hasil monitoring dan evaluasi dapat berupa perubahan risiko, prosedur maupun kebijakan yang menunjukkan efektivitas penerapan SMAP. Hasil monitoring dan evaluasi ini disampaikan kepada pimpinan puncak (top management).

Meraih Manfaat dari Implementasi SMAP

Menerapkan SMAP dalam suatu entitas organisasi jelas akan memberikan manfaat bagi organisasi itu sendiri dan pemangku kepentingan yang terkait. Beberapa manfaat tersebut diantaranya adalah menguatkan keamanan eksternal organisasi berdasarkan efektivitas kebijakan dan prosedur anti penyuapan. Di samping itu, dengan mengimplementasikan SMAP maka suatu organisasi telah menunjukkan kepatuhannya kepada undang-undang yang relevan terhadap tindak pidana penyuapan, seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, ataupun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Manfaat lain adalah pihak manajemen telah bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memantau dan mengelola risiko di sepanjang mata rantai organisasi, khususnya risiko yang terjadi akibat praktik penyuapan. Dan juga, khususnya bagi badan usaha, implementasi SMAP bermanfaat dalam memastikan bahwa pemasok, subkontraktor, dan agen berkomitmen untuk memastikan bisnis usaha yang anti penyuapan.

Di sisi lain, penerapan SMAP dengan sendirinya akan membantu organisasi untuk mengendalikan praktik penyuapan dengan cara mencegah, mendeteksi, melaporkan, dan menangani penyuapan. Dalam kaitan dengan iklim usaha dan bisnis di Indonesia, implementasi SMAP yang meluas pada pelbagai organisasi publik maupun bisnis akan semakin menyehatkan dan berdaya saing terhadap negara lain. Hal ini dikarenakan organisasi yang menerapkan SNI ISO 37001 akan memiliki standar organisasi dan pengakuan internasional yang lebih baik, yang tentunya berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi kita.

Selain dari pada itu, untuk mengimplementasi SMAP atau SNI ISO 37001 juga akan membuka lapangan pekerjaan tambahan baru yang akan menyerap banyak tenaga kerja di industri akreditasi dan auditor di Indonesia.

Sebagai penutup, dapat diinformasikan bahwa baberapa organisasi pemerintah, BUMN, dan perusahaan swasta telah menerapkan sistem anti suap tersebut. Mudah-mudahan jumlahnya akan semakin banyak dan meluas, sehingga mampu menekan praktik suap di berbagai sektor.

PT Sepatu Mas Idaman
Raja Produksi Sepatu Brand Internasional

Sejak 1987 hampir seluruh produksi PT Sepatu Mas Idaman (Semasi) diperuntukkan bagi sepatu pesanan merek-merek dunia. Namun berkat pengalaman yang dimiliki, Semasi pun memberanikan diri membangun merek lokal berkualitas internasional.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara produsen sepatu dunia. Salah satunya PT Sepatu Mas Idaman, yang kini memproduksi tak kurang 2 juta pasang sepatu setiap tahunnya dari banyak merek sepatu terkenal dunia. Bagaimana potret manufaktur sepatu berkualitas internasional ini?

Adalah PT Sepatu Mas Idaman (Semasi) yang bediri sejak 1987. Berlokasi di jalan Sukaraja No. 29, Bogor, pada saat-saat awal berdirinya perusahaan ini hanya memproduksi sekitar 200-an pasang pertahun secara temporer yang dipesan oleh *brand* sepatu terkenal dunia. Seiring dengan perjalanan waktu, perusahaan tumbuh dengan semakin meningkatnya jumlah pesanan dari berbagai negara.

Kini rata-rata volume produksi Semasi dalam setahun berkisar dua jutaan pasang sepatu. Untuk memproduksi sepatu sebanyak itu, Semasi dilengkapi dengan lima *line production* dan satu *line production* kecil serta ditambah dengan *development workshop* yang memproduksi sepatu untuk sampel. Di dalamnya sudah termasuk fasilitas *cutting* dan *stitching* serta *assembly*.

Standar Kualitas Berkelas Internasional

Untuk memproduksi sepatu sebanyak dua juta pasang, *line production* umumnya berproduksi dalam satu shift. Hanya dua *line production* yang menerapkan sistem kerja dua shift. "Apalagi untuk pekerjaan yang critical yang harus dikerjakan secara hati-hati untuk menjaga kualitas. Kita lebih benyak bekerja satu shift," kata General Manager Sepatu Mas Idaman, Yuliasari kepada redaksi Majalah SOLUSI akhir Juni lalu.

Di sisi lain, Yuliasari mengatakan bahwa Semasi merupakan pabrik sepatu yang *expertise* membuat sepatu

berkualitas tinggi dengan segmen middle up. Beberapa merek sepatu terkenal dunia, seperti *Rockport, Lacoste, Hush Puppies, Kickers, Sperry Top Sider, MBT, Sledgers, Johnston and Murphy* dan lain-lain.

Semasi juga tetap memproduksi dan memasok secara *original, equipment, manufacturer* (OEM) merek-merek sepatu terkenal di luar negeri. Semasi bukanlah pemain baru di bisnis sepatu kulit formal dan casual. Sejak sepenuhnya dimiliki Grup Gunung Sewu, Semasi pada 1993 mulai ekspansi dengan membuat pabrik baru di Pasir Laya Sukaraja, Bogor. Semasi mulai memasok merek terkenal dari luar negeri pada 1991. Saat itu, Semasi memasok sepatu-sepatu Jepang seperti *Honma*, sepatu golf terkenal dan berstandard dari pabrik sepatu besar di negeri matahari terbit itu. Boleh dibilang, memasok merek-merek Jepang menjadi *milestone* penting sehingga Semasi bisa memasok merek-merek sepatu ternama di negara lain, seperti ke Amerika Serikat. Sejak saat itu, Semasi pun mampu menembus pasar ekspor ke Amerika Serikat dengan memasok sepatu merek *Rockport*.

Selanjutnya, pesanan demi pesanan dari merek merek global lainnya terus berdatangan, antara lain dari merek *Lacoste*, Perancis dan merek-merek sepatu dari Amerika Serikat lainya seperti *Sperry Top Sider, Wolverine, dan Hush Puppies*. Jangan kaget bila Anda ke Amerika Serikat, membeli sepatu merek *Rockport*, maka di sepatu tersebut tertera made in Indonesia. Kalau Anda membeli *Rockport* tiga tahun yang lalu, tertera tulisan made in China, karena sepatu tersebut di produksi di China. "Sepatu-sepatu merek terkenal banyak yang diproduksi di Indonesia," jelas Yuliasari.

Menurut Yuliasari, Semasi dilengkapi dengan sejumlah laboratorium yang bersertifikasi standar internasional yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan sepatu tujuan ekspor. Laboratorium yang ada itu setiap tahunnya diaudit. Menurut Yuliasari, sertifikasi laboratorium dan instrument penunjang lainnya sudah setara dengan ISO 9001 dan ISO 14000. Di luar sertifikat tersebut, Semasi juga dilengkapi dengan *certificate requirements* yang harus dimiliki untuk memproduksi sepatu-sepatu pesanan dari banyak negara.

Sejak awal berdiri perusahaan ini di-*set up* untuk memproduksi sepatu berkualitas tinggi. Tak heran jika *quality control* di pabrik cukup ketat. Bahkan, pabrik ini tak dapat memproduksi sepatu berkualitas rendah. "Seluruh material di-test, seperti test kelenturan, test warna, apakah warna yang digunakan luntur atau tidak," lanjut Yuliasari.

Di samping itu, tambahnya, pihak pemesan menempatkan orangnya di pabrik untuk mengontrol kualitas yang diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Setiap dua bulan pihak Semasi bertemu dengan auditor untuk memastikan standar kualitas produk. "Pengaturan para pekerja mengikuti regulasi mereka. Kadang regulasi mereka lebih tinggi dibandingkan regulasi pemerintah," tambahnya. Artinya, Semasi harus mengikuti standar internasional untuk memastikan kualitas.

Sistem penjualan yang dilakukan PT Semasi adalah berupa *job order* dimana konsumen dari produk sepatu tersebut adalah perusahaan-perusahaan sepatu terkemuka di dunia. Setelah diproduksi dari Indonesia, kemudian diekspor ke luar negeri sesuai negara tujuan yang diminta pemesan, karena sistem *Business to Business* (B to B) dimana pihak pemesan yang memiliki *brand*. Dan oleh pemesannya diimpor kembali ke berbagai negara, termasuk Indonesia.

Jangan kaget bila anda menggunakan sepatu merek-merek terkenal di dunia, ternyata diproduksi di Indonesia.

Lebih lanjut Yuliasari menambahkan, tidak hanya dari segi material, tapi dari segi *technical*, fasilitas yang dimiliki, sumber daya manusia (SDM) dan sebagainya, dirancang untuk bisa memproduksi sepatu *middle up*. "Jadi kami *expertise* membuat sepatu berkualitas tinggi untuk *middle up*," kata Yuliasari kepada Majalah Pengawasan SOLUSI.

Namun, sejauh ini tenaga *technical advisor* masih didatangkan dari Korea Selatan. Mengapa menggunakan technical negeri Ginseng tersebut? Menurut Yuliasari, *technical advisor* asal Korea mempunyai kemampuan lebih dibandingkan *technical advisor* dari negara lain. Pabrik-pabrik sepatu kelas *middle up* dunia umumnya menggunakan tenaga ahli dari sana.

Semasi juga bekerjasama dengan Akademi Teknologi Kulit, Yogyakarta, unit pendidikan politeknik Kementerian Perindustrian. Banyak lulusan dari akademi tersebut direkrut di Semasi. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dengan tenaga kerja di Indonesia.

Tak heran bila perusahaan ini semuanya menggunakan tenaga kerja lokal. Bila kapasitas produksi mencapai puncak, jumlah tenaga kerja bisa mencapai 3.000 karyawan yang terlibat dalam proses produksi. Tapi saat ini hanya 1.800 karyawan. "Jika volume produksi meningkat, baru menggunakan tenaga kerja tidak tetap," katanya. Pasalnya, tidak sepanjang tahun order pembuatan sepatu stabil. Dalam setahun ada bulan-bulan tertentu yang pesanan sepatu berkurang. Faktor ini, kata Yuliasari, disebabkan karena di Eropa umumnya ada dua musim yang akan mempengaruhi pesanan pembuatan sepatu.

Hal lain yang patut dicatat, Semasi merupakan salah satu pabrik sepatu yang mulai mencanangkan implementasi industri 4.0. "Kami mendapat sertifikat penghargaan dengan mencanangkan penerapan industri 4.0," ujar Yuliasari. "Hanya ada dua pabrik sepatu yang mendapat penghargaan tersebut, salah satunya adalah Semasi."

Proses pengolahan data di wilayah produksi pun sudah *computerize*. Di mana dalam penghitungan *cost production* menggunakan ERP (*Enterprise Resource Planning*) yang mengorganisasikan masing-masing proses dalam unit kerja. "Gudang kami juga dilengkapi RFID (*Radio Frequency Identificarion*), untuk mengidentifikasi orang ataupun benda secara otomatis. Robotik yang belum bisa kami terapkan di sini, karena selain multi produk, kami juga banyak mengandalkan keterampilan tangan," tambahnya.

Brand Lokal

Tidak hanya memproduksi sepatu untuk merek-merek internasional, Semasi juga memproduksi *brand* sepatu milik sendiri. Namanya Gino Mariani yang sudah dibesut sejak tahun 1995. Dalam hal ini, kegiatan pemasaran dan distribusi Gino Mariani berada di bawah bendera PT Sepatu Mas Indonesia (Semasindo). Selain pasar nasional yang menjadi prioritas, penetrasi Gino Mariani juga sudah memasuki pasar luar negeri. "Jadi, Semasi hanya fokus pada kegiatan produksi sepatu-sepatu, dalam hal ini memproduksi merek terkenal dunia, termasuk Gino Mariani yang berada di bawah Semasindo, " ujar General Manager Sepatu Mas Indonesia, Denny Budianto.

Ide membangun brand Gino Mariani

dimulai ketika perusahaan melihat market Indonesia yang begitu besar. Sementara perusahaan ini memiliki pengalaman memproduksi merek-merek sepatu terkenal dengan standar internasional. Hal ini menjadi alasan, mengapa kita tidak men-*develop* merek sendiri. Atas ide tersebut, maka lahirlah *brand* sepatu Gino Mariani yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar segmen *middle up*.

Tak heran bila harga sepatu Gino Mariani bisa sampai di atas Rp 2 juta karena terbuat dari kulit (*leather),* diantaranya dari kulit rusa. Berangkat dari pengalaman membuat sepatu-sepatu *brand i*nternasional, membuat pihak Semasi percaya diri membangun merek berkualitas dengan *benchmark* sepatu-sepatu terkenal dunia. "Kurang lebih empat tahun terakhir *brand* lokal sudah cukup berhasil menanamkan persepsi yang baik di benak konsumen tentang produk yang berkualitas. Karena beruntung saat ini di Indonesia sudah mulai banyak start-up yang memegang teguh kualitas. Sejalan dengan waktu konsumen sudah lebih percaya itu!,"terang alumnus Universitas Katolik Indonesia, Atmajaya Jakarta ini .

Menurut Denny, di awal peluncurannya, saat itu Gino Mariani masuk pasar modern melalui gerai-gerai SOGO Department Store dan mulai menyusul di beberapa daerah lainnya di Indonesia. Walaupun saat itu *brand* Gino Mariani belum ada yang kenal bahwa sepatu itu *brand* Indonesia dan pemasarannya pun belum ditangani secara serius, namun Semasi mempunyai komitmen untuk terus memproduksinya.

Beberapa tahun terakhir Gino Mariani tampil dengan warna-warni yang lebih atraktif mengikuti tren model sepatu yang berkembang. "Dengan melangkah 10.000 langkah perhari, terasa tidak capek. Kenapa? Ada sentuhan teknologi yang membuat pemakai nyaman. Teknologi nyaman ini yang gencar dikampanyekan dalam lima tahun terakhir ini," jelas Denny yang mulai fokus membangun *campaign* untuk *brand* sepatu yang diusungnya.

Alhasil, hingga saat ini Gini Mariani tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Sementara penetrasi pasar ekspor mampu menembus pasar Vietnam. "Anda bisa menemukan sepatu Gino Mariani bila berkunjung ke Ho Chi Mienh, Vietnam. Kebetulan ada beberapa *buyer* beli putus seperti dari Vietnam dan Dubai," papar Denny serius.

Namun diakuinya, bahan baku yang digunakan dalam produksi sepatunya lebih dari 90% masih impor. Hal itu memang sangat disayangkan, kenapa tidak menggunakan *row material* lokal. Walaupun sempat beberapa kali dicoba menggunakan bahan baku lokal, ternyata hasilnya belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan.
[EN/SB/Gsn].

Ada Kudengar

Oleh: Edwardsyah Nurdin

Ada kudengar suaraMu
ada. Nyanyi kembara di antara kota
yang terjebak. Betapa aku rindu
bocah desa
yang berlindung dalam sembunyiMu

Ada kudengar suaraMu
ada. Entah di mana kusimpan jam
hilang mungkin. Sia-sia bicara
dengan Diam
hilang segala rupa dalam ujudMu

Gerimis

Oleh: Edwardsyah Nurdin

Siapa sesungguhnya Engkau yang
selalu bersama dingin. Wajah yang
diam. Yang menetes
seperti es
Yang kubiarkan butirnya hinggap
di kaca jendela
dan cahaya enggan masuk kusapa

Siapa sesungguhnya
Engkau yang asing. Yang
menyapa tanpa kata-kata
Yang membuat aku lupa kapan kita
pernah berbincang

Tidak kutahu sungguh
Dan kuambil sekerat lelah
menunggu caya mentari

Bertempat di ruang Garuda Kementerian Perindustrian, 14 Juni 2019 lalu, telah dilaksanakan Halal Bihalal keluarga besar Inspektorat Jenderal Kemenperin, sekaligus syukuran dengan telah diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-11 (sebelas) kali secara berturut turut oleh BPK atas pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenperin Th. 2018. Tampak hadir pada acara tersebut diantaranya Inspektur Jenderal Kemenperin Setyo Wasisto dan Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar, serta para mantan Inspektur Jenderal terdahulu yaitu Sakri Widhianto dan Syarif Hidayat.

Inspektorat Jenderal Kemenperin pada tanggal 23 Mei 2019 lalu bertempat di ruang Garuda Kemenperin telah menyelenggarakan Sosialisasi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Acara dibuka oleh Inspektur Jenderal Kemenperin dan penyajian materi disampaikan oleh narasumber dari Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian Badan Standarisasi Nasional (BSN), dengan dihadiri oleh beberapa pejabat di lingkungan Kemenperin. Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa SNI ISO 37001:2016 merupakan Standar Nasional Indonesia yang mengatur sistem manajemen suatu organisasi dalam mencegah terjadinya penyuapan.

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI

Untuk Kejayaan Indonesia

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Perindustrian
REPUBLIK INDONESIA

Bangun Indonesia
Dengan Produksi Dalam Negeri

MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI

WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI